

JAYA CM	DATA UMUM	TANGGAL	6-Jul-23
DIVISI MARKETING	TRANSPORTASI	HALAMAN	1 / 1

NAMA PROYEK : Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJPN III Sumut)
PEMILIK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Pelaksana: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJPN) Sumut
JENIS PROYEK : Jalan Nasional
LOKASI : Kab. Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Kota gunung Sitoli Provinsi
Sumatera Utara yang menghubungkan 4 pusat pemukiman / populasi
PERIODE : 180 hari sejak SPMK

1	Panjang Track Preservasi Jalan:	
	- Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)	7,57 Km
	- Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)	4,40 Km
	- Lahusa - Gomo (Kab. Nias Selatan)	16,67 Km
	- Hiisebua - Daulo (Kab. Nias)	5,07 Km
	- Wea wea - Somi (Kab. Nias)	4,40 Km
	- Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)	14,00 Km
	Total	52,11 Km
2	Lingkup Pekerjaan	Pengawasan
		A. Pengawasan Teknik Jalan Daerah Antara Kab. Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara
3	Biaya Konstruksi	TBA
	PAGU	Rp 5.306.099.000 incl PPN % ; KSO - Jaya CM 60 %
4	Konsultan	PT Jaya CM (Leader)
		PT Sarana Multi Daya (member)
5	Kontraktor	TBA



MARKETING JAYA CM <mktjayacm@gmail.com>

(LPSE) Pengumuman Pembatalan Tender

1 pesan

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <lpsepupr@pu.go.id>

Kepada: mktjayacm@gmail.com

21 Juli 2023 pukul 15.23

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

Pemilik Email mktjayacm@gmail.com

di

Tempat

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu mengikuti tender yang diselenggarakan melalui LPSE, dan bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa terhadap paket pengadaan di bawah ini telah dilakukan pembatalan:

Kode Tender 85498064

Nama Paket Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut)

Alasan - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 3-BM.5.B-26

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

Kode Tender	85498064				
Nama Tender	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut) Seleksi Gagal Evaluasi Ulang				
Alasan Pembatalan	- Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran				
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana		
	43683369	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut)	APBN		
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN JALAN DAERAH 4.pdf				
Tanggal Pembuatan	31 Mei 2023				
Tahap Tender Saat Ini	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya				
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Satuan Kerja	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA				
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi				
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya				
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction				
Tahun Anggaran	APBN 2023				
Nilai Pagu Paket	Rp. 5.306.099.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 5.306.099.000,00		
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan				
Lokasi Pekerjaan	■ KAB. NIAS UTARA- Nias Utara (Kab.)				
Bobot Teknis	80.0				
Bobot Biaya	20.0				
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table border="1"> <tr> <td>Sertifikat Badan Usaha</td> <td>Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020</td> </tr> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain</p> <p>Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi</p>			Sertifikat Badan Usaha	Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020
Sertifikat Badan Usaha	Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020				
Peserta Tender	50 peserta				

No Tahap		Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	31 Mei 2023 17:00	7 Juni 2023 17:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	31 Mei 2023 17:00	12 Juni 2023 08:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	5 Juni 2023 08:00	5 Juni 2023 12:00	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	5 Juni 2023 12:01	16 Juni 2023 08:00	1 kali perubahan
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16 Juni 2023 08:01	21 Juni 2023 14:00	2 kali perubahan
6	Pembuktian Kualifikasi	16 Juni 2023 08:01	21 Juni 2023 14:00	2 kali perubahan
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	21 Juni 2023 14:01	21 Juni 2023 15:00	1 kali perubahan
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	21 Juni 2023 15:01	21 Juni 2023 16:00	1 kali perubahan
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	22 Juni 2023 08:00	27 Juni 2023 08:00	1 kali perubahan
10	Download Dokumen Pemilihan	27 Juni 2023 09:00	7 Juli 2023 16:30	3 kali perubahan
11	Pemberian Penjelasan	3 Juli 2023 08:00	3 Juli 2023 12:00	2 kali perubahan
12	Upload Dokumen Penawaran	3 Juli 2023 12:01	7 Juli 2023 16:30	3 kali perubahan
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	7 Juli 2023 16:31	10 Juli 2023 15:00	4 kali perubahan
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	10 Juli 2023 15:01	10 Juli 2023 16:30	2 kali perubahan
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	11 Juli 2023 08:00	12 Juli 2023 12:00	4 kali perubahan
16	Penetapan Pemenang	12 Juli 2023 12:01	14 Juli 2023 16:00	5 kali perubahan
17	Pengumuman Pemenang	14 Juli 2023 16:01	14 Juli 2023 16:30	5 kali perubahan
18	Masa Sanggah	15 Juli 2023 08:00	20 Juli 2023 08:00	5 kali perubahan
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	21 Juli 2023 08:00	21 Juli 2023 23:59	2 kali perubahan
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 Juli 2023 08:00	24 Juli 2023 12:00	2 kali perubahan
21	Penandatanganan Kontrak	24 Juli 2023 12:01	24 Juli 2023 16:30	2 kali perubahan

[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

No	Nama Peserta	K	SK	SB	B	A	T	ST	P	PT	HN	H	P	PK	Alasan
1	PT JAYA CONSTRUCTION MANAGEMENT MANGGALA PRATAMA - 01.364.013.1-062.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✗	31,64							Tidak Memenuhi Minimal Ambang Batas Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 43 (Empat Puluh Tiga). PT. Jaya Construction Management Manggala Pratama Memiliki Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 0 (Nol) Disebabkan Surat Kesediaan Untuk Ditugaskan Terdapat Kesalahan Nama Paket Pekerjaan
2	PT. Jasa Mitra Manunggal - 01.216.498.4-429.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✗	62,38							Tidak Memenuhi Minimal Ambang Batas Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 43 (Empat Puluh Tiga). PT. Jasa Mitra Manunggal Memiliki Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 29,38 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan). Sesuai Dengan Instruksi Kepada Penyedia (IKP) Angka 43.2 Menyatakan Bahwa Pengalaman Yang Tidak Tercantum dalam SIMPAN, Tidak Dapat Dievaluasi Sebagai Pengalaman
3	PT. GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT - 96.117.424.0-526.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✗	27,78							Tidak memenuhi minimal ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli sebesar 43 (Empat puluh tiga). PT. Gunung Giri Engineering Consultant Memiliki Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 0 (Nol) Disebabkan Personel Manajerial dengan jabatan Team Leader 1 terikat/sedang melaksanakan pekerjaan pada paket pekerjaan Manajemen Konstruksi Land Development Sub-WP 1B dan Sub-WP 1C sesuai dengan hasil klarifikasi kepada pengguna jasa
4	PT.JASAPLANT PERASSYANTHA- 01.614.726.6-722.000	-			-	-	-	-							
5	PT. ENDAH BANGUN NAGARA CONSULTANT - 02.940.992.7-331.000	-			-	-	-	-							
6	CV. Prisma Tehnik - 31.454.830.6-122.000	-			-	-	-	-							
7	PT. Cail Utama Konsultan - 01.801.075.1-121.000	-			-	-	-	-							
8	PT. IRBIE NUSA KONSULTAN - 85.224.876.4-122.000	-			-	-	-	-							
9	PT. SEECONS - 01.127.804.1-441.000	-			-	-	-	-							
10	PT. YODYAKARYA(Persero) WILAYAH IV MEDAN - 01.001.616.0-124.001	-			-	-	-	-							
11	PT. ANUGERAH KRIDA PRADANA- 01.333.888.4-064.000	-			-	-	-	-							
12	PT. HARAWANA CONSULTANT - 01.537.868.0-113.000	-			-	-	-	-							
13	PT Sarana Multi Daya - 01.342.109.4-016.000	-			-	-	-	-							
14	PT. GITACIPTASIAGAYASA- 01.328.218.1-015.000	-			-	-	-	-							
15	PT. ESKAPINDO MATRA- 01.308.943.8-003.000	-			-	-	-	-							
16	PT DAKSINAPATI KARSA KONSULTINDO - 01.813.146.6-019.000	-			-	-	-	-							
17	PT. Virama Karya (Persero) Cabang Sumatera - 01.000.485.1-124.001	-			-	-	-	-							
18	PT. PEMETAR ARGE ENGINEERING - 01.431.181.5-123.000	-			-	-	-	-							
19	PT. EPADASCON PERMATA- 01.339.850.8-013.000	-			-	-	-	-							
20	PT. DARDELA YASAGUNA- 01.393.334.6-013.000	✗	100,0		-	-	-	-							Tidak Masuk Daftar Pendek Berdasarkan Nilai Kontrak Pekerjaan Sejenis Tertinggi
21	PT. YODYAKARYA (PERSEPO) - 01.001.616.0-093.000	-			-	-	-	-							
22	PT Geoprodex Nusantara - 02.637.442.1-124.000	-			-	-	-	-							

[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

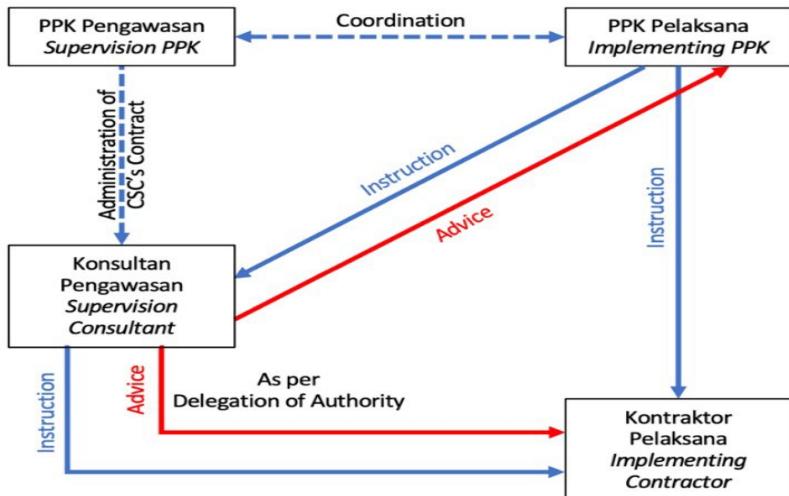
Kode Tender	85498064				
Nama Tender	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut)				
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana		
	43683369	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut)	APBN		
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN JALAN DAERAH 4.pdf				
Tanggal Pembuatan	31 Mei 2023				
Tahap Tender Saat Ini	Download Dokumen Pemilihan [...]				
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Satuan Kerja	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA				
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi				
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya				
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction				
Tahun Anggaran	APBN 2023				
Nilai Pagu Paket	Rp. 5.306.099.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 5.306.099.000,00		
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan				
Lokasi Pekerjaan	■ KAB. NIAS UTARA- Nias Utara (Kab.)				
Bobot Teknis	80.0				
Bobot Biaya	20.0				
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table border="1"> <tr> <td>Sertifikat Badan Usaha</td> <td>Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020</td> </tr> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain</p> <p>Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi</p>			Sertifikat Badan Usaha	Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020
Sertifikat Badan Usaha	Kualifikasi Usaha Besar sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 20152017 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020				
Peserta Tender	50 peserta				

[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

No	Nama Peserta	K	SK	SB	B	A	T	ST	P	PT	HN	H	SH	SA	P	PK	Alasan
1	PT. GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT - 96.117.424.0-526.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✓	✓	76,35	Rp. 4.497.831.000,00	Rp. 4.497.831.000,00	✓	★				
2	PT JAYA CONSTRUCTION MANAGEMENT MANGGALAPRATAMA - 01.364.013.1- 062.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✓	✗	31,64		-						Tidak Memenuhi Minimal Ambang Batas Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 31,64 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Empat). PT. Jaya Construction Management Manggala Pratama Memiliki Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 0 (Nol) Disebabkan Surat Kesediaan Untuk Ditugaskan Terdapat Kesalahan Nama Paket Pekerjaan
3	PT. Jasa Mitra Manunggal - 01.216.498.4-429.000	✓	100,0	100,0	✓	✓	✓	✗	62,38		-						Tidak Memenuhi Minimal Ambang Batas Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 43 (Empat Puluh Tiga). PT. Jasa Mitra Manunggal Memiliki Nilai Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli Sebesar 29,38 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan). Sesuai Dengan Instruksi Kepada Penyedia (IKP) Angka 43.2 Menyatakan Bahwa Pengalaman Yang Tidak Tercantum dalam SIMPAN, Tidak Dapat Dievaluasi Sebagai Pengalaman
4	PT. YOKATIGA CONSULTANT - 02.005.208.0-331.000	-									-						
5	PT.JASAPLANT PERASSYANTHA- 01.614.726.6-722.000	-									-						
6	PT. KLAPERON REKA CIPITA- 83.741.296.4- 101.000	-									-						
7	PT. ENDAH BANGUN NAGARA CONSULTANT - 02.940.992.7-331.000	-									-						
8	CV. SETIA CONSULTANT - 01.430.839.9-124.000	-									-						
9	PT. ARIAJASA REKSATAMA- 01.203.046.6-609.000	-									-						
10	CV. Prisma Tehnik - 31.454.830.6-122.000	-									-						
11	PT. Cail Utama Konsultan - 01.801.075.1-121.000	-									-						
12	PT. IRBIE NUSA KONSULTAN - 85.224.876.4-122.000	-									-						
13	PT. SEECONS - 01.127.804.1-441.000	-									-						
14	PT. YODYAKARYA (Persero) WILAYAH IV MEDAN - 01.001.616.0-124.001	-									-						
15	PT. ANUGERAH KRIDAPRADANA- 01.333.888.4-064.000	-									-						
16	PT. HARAWANA CONSULTANT - 01.537.868.0-113.000	-									-						
17	PT Sarana Multi Daya - 01.342.109.4- 016.000	-									-						
18	PT Pemeta	-									-						

URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN :

- Preservasi Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut) yang selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi berada di ruas Jalan daerah yaitu berada di kepulauan Nias dan lokasinya terdiri dari 4 kabupaten kota, Jalan tersebut merupakan jalan daerah guna mendukung kelancaran untuk angkutan barang dan manusia
- Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diuraikan di atas melalui Penanganan Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitas Jalan daerah-4 Satker Wilayah III Sumut yang tersebar di 4 Kabupaten Kota dengan total panjang penanganan adalah :51,13 Km



Gambar 1. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak

3 Tujuan Khusus

- a. Tujuan utama penugasan ini adalah penyediaan Jasa Konsultansi untuk pengawasan terhadap **Paket- Pengawasan Teknik Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut)**

No.	Uraian	Panjang Penanganan (Km)
1.	Preservasi Jalan Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)	7,57
2.	Preservasi Jalan Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)	4,40
3.	Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab.Nias Selatan)	16,67
4.	Preservasi Jalan Hiiseuba - Daulo (Kab. Nias)	5,07
5.	Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)	4,40
6.	Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)	14,00
Total		52,11

- b. Pekerjaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) *Identifikasi dan relokasi utilitas yang ada;*
- 2) *Kendali vegetasi;*
- 3) *Pembersihan dan pencabutan;*
- 4) *Pekerjaan tanah;*
- 5) *Perbaikan perkerasan*
- 6) *Pekerjaan drainase;*
- 7) ***Pekerjaan bahu Jalan;***
- 8) *Pekerjaan jembatan/ box/goronggorong atau bangunan lain;;*
- 9) *Kendali lalu lintas dan fitur keselamatan;*
- 10) *Rambu dan marka.*

c. Konsultan Pengawas wajib:

- 1) Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu (QA) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi, masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan persyaratan-persyaratan kualitatif dan kuantitatif;
- 3) Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang diusulkan Penyedia Konstruksi;
- 4) *Membuat Program Mutu dan Rencana Keselamatan Konstruksi Konsultan (RKK) Pengawasan, memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;*
- 5) Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan di dalam proses konstruksi, termasuk praktik dan prosedur pengujian material, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi teknik;
- 6) Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- 7) Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, fokus pada isu-isu pemukiman kembali (jika ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;
- 8) Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia Konstruksi, ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan serta laporan lainnya;
- 9) Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari Penyedia Konstruksi;
- 10) Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan, serta laporan lainnya;
- 11) Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai dengan kewenangan Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa; dan
- 12) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan memberikan masukkan tentang aspek-aspek yang berada di bawah kewenangan Pengguna Jasa.

4 Lokasi dan Ciri Utama Pekerjaan

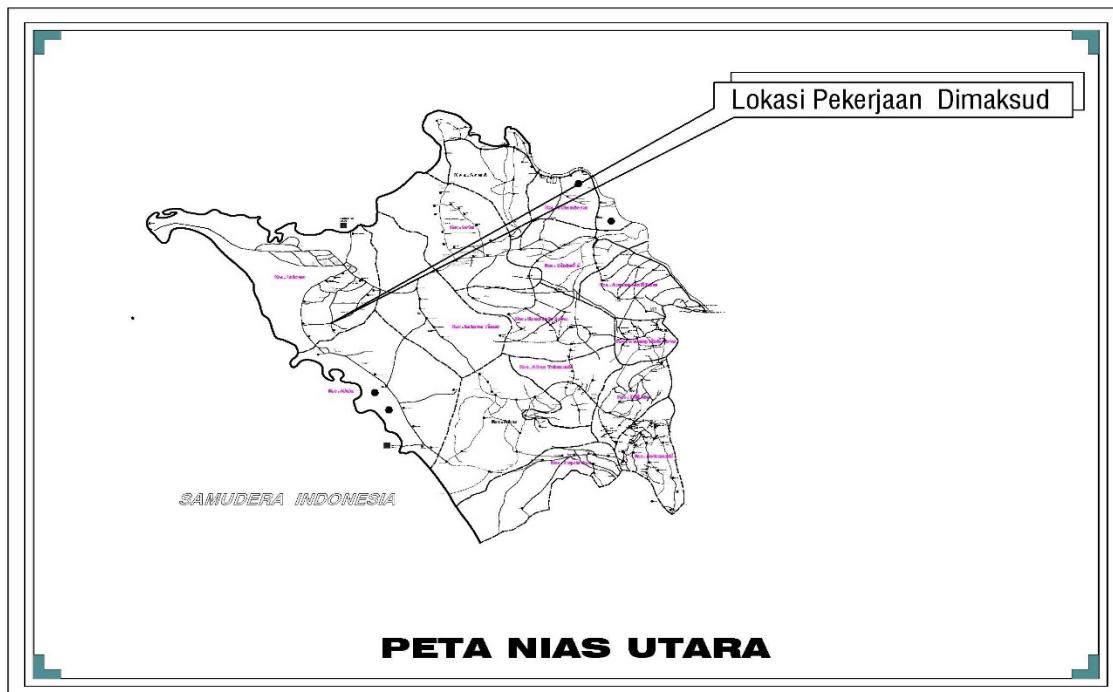
4.1 Lokasi Geografis

Rute **Jalan Daerah 4 (Satker PJN III Sumut) Nias, Cs** melintasi wilayah antara **Kab. Nias, Nias Utara, Nias Selatan** dan **Kota Gunung Sitoli** yang menghubungkan 4 pusat pemukiman / populasi.

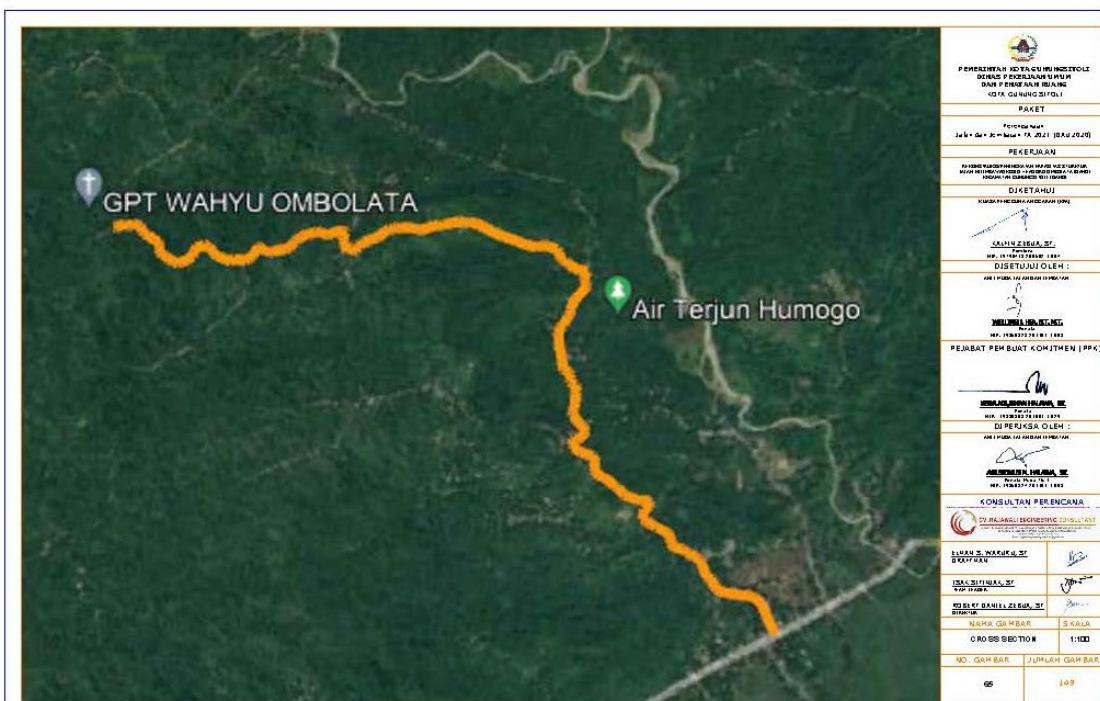
Ruas ini **berada di Provinsi Sumatera Utara**

Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut :

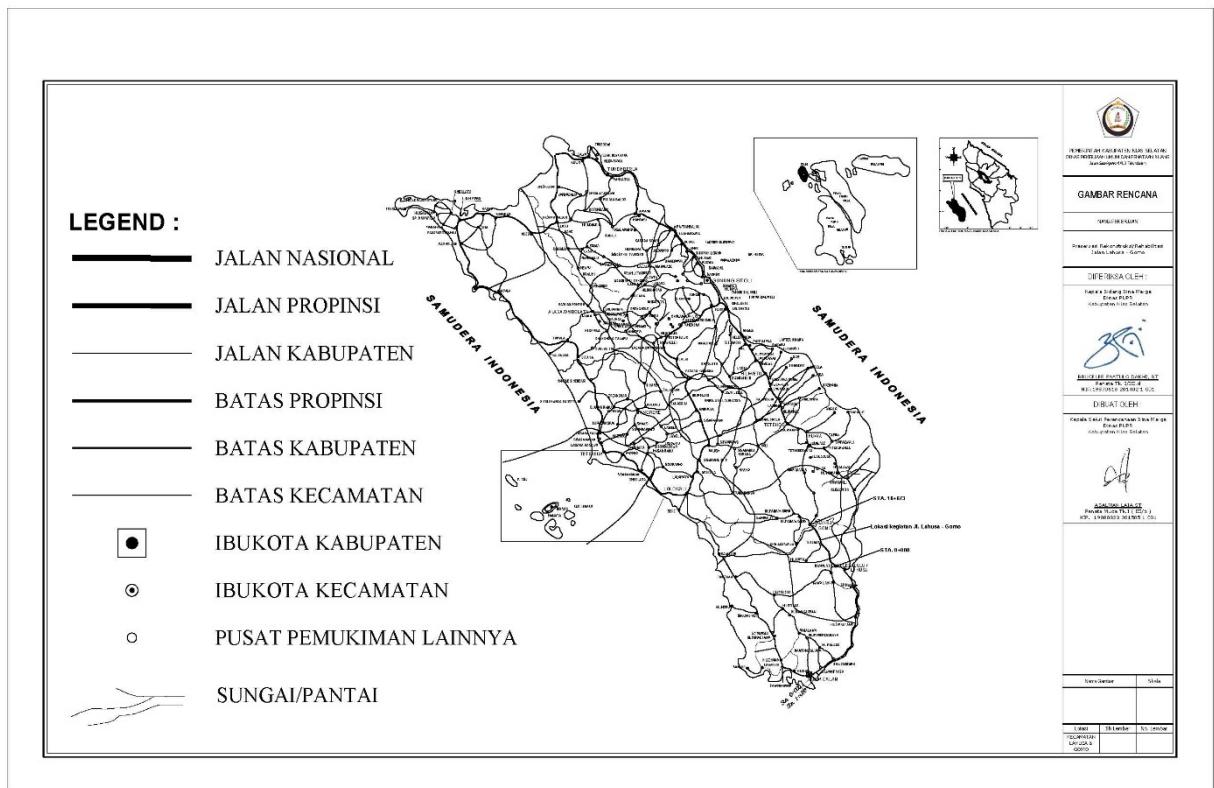
Preservasi Jalan Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara) :



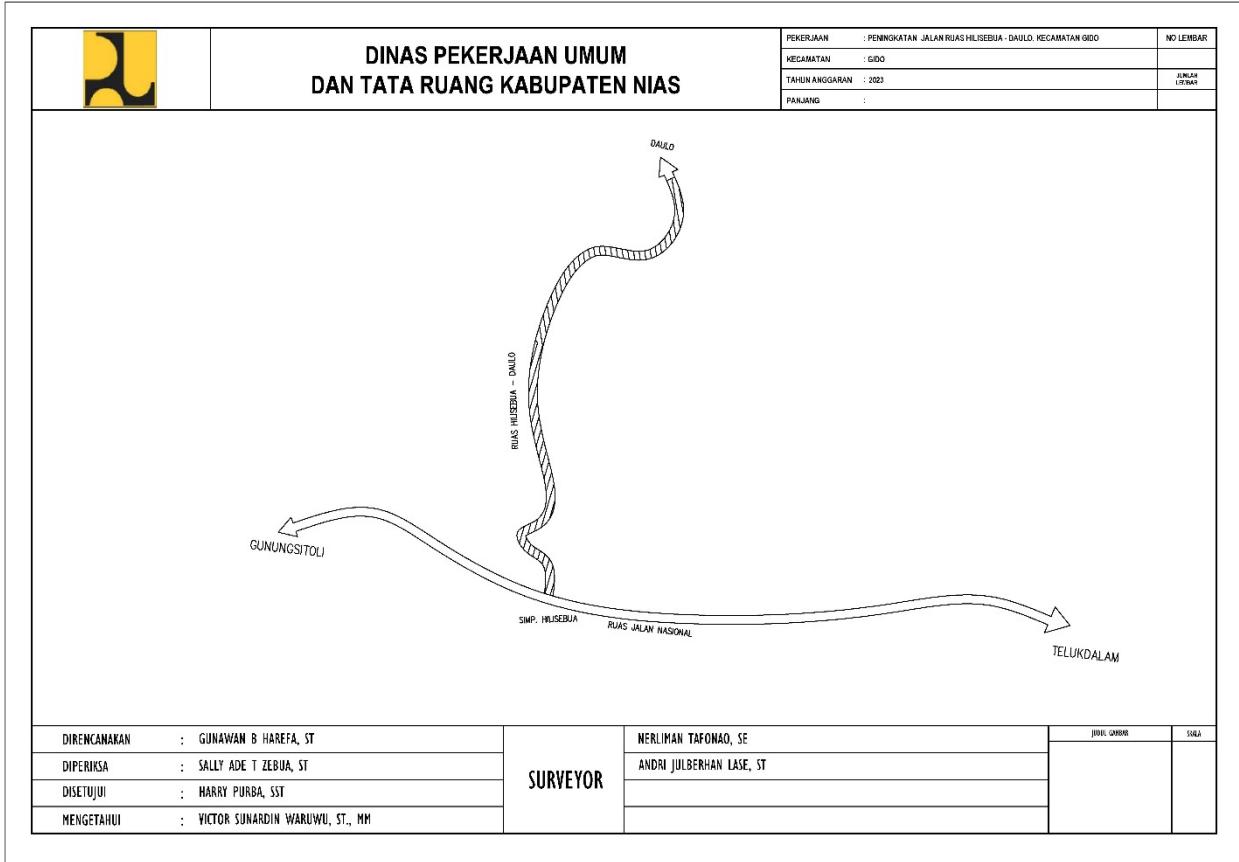
Preservasi Jalan Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)



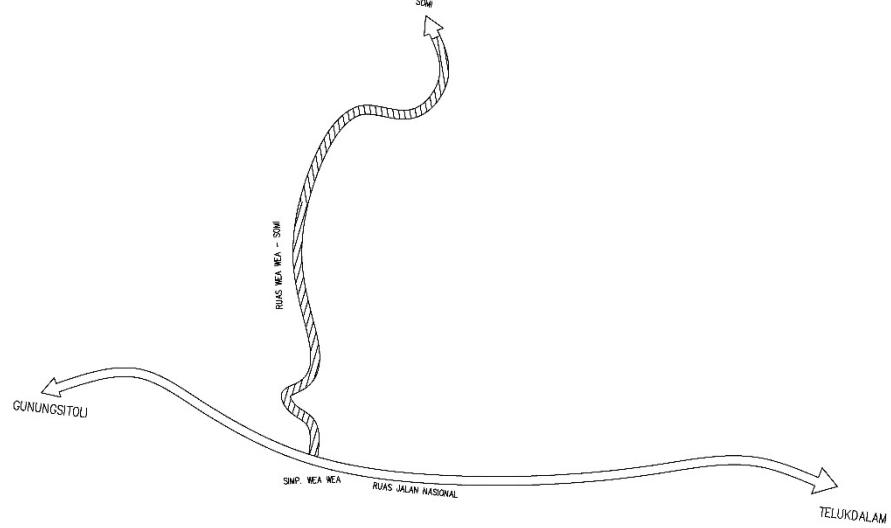
Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab.Nias Selatan)



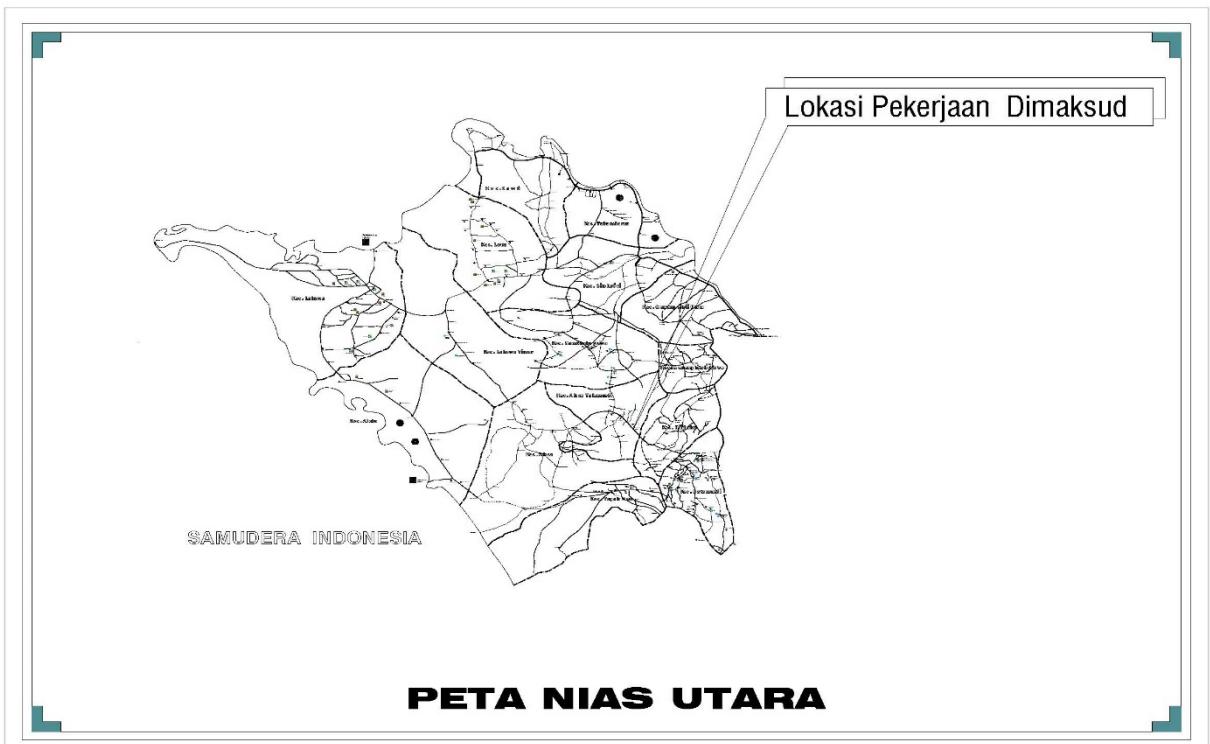
Preservasi Jalan Hiisebua - Daulo (Kab. Nias)



Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)

 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS WEA WEA - SOMI, KECAMATAN SOGAEADU</td> <td style="padding: 2px;">NO LEMBAR :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">KECAMATAN : SOGAEADU</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TAHUN ANGGARAN : 2023</td> <td style="padding: 2px;">JULI-HI LEMBAR</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PANJANG :</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> 	PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS WEA WEA - SOMI, KECAMATAN SOGAEADU	NO LEMBAR :	KECAMATAN : SOGAEADU		TAHUN ANGGARAN : 2023	JULI-HI LEMBAR	PANJANG :																	
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS WEA WEA - SOMI, KECAMATAN SOGAEADU	NO LEMBAR :																								
KECAMATAN : SOGAEADU																									
TAHUN ANGGARAN : 2023	JULI-HI LEMBAR																								
PANJANG :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; padding: 2px;">DIRENCANAKAN :</td> <td style="width: 200px; padding: 2px;">GUNAWAN B HAREFA, ST</td> <td style="width: 50px; padding: 2px;">SURVEYOR :</td> <td style="width: 200px; padding: 2px;">NERLIMAN TAFONAO, SE</td> <td style="width: 50px; padding: 2px;">JINIS SHM</td> <td style="width: 50px; padding: 2px;">SMA</td> </tr> <tr> <td>DIPERIKSA :</td> <td>SALLY ADE T ZEBUA, ST</td> <td></td> <td>ANDRI JULBERHAN LASE, ST</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISETJUUI :</td> <td>HARRY PURBA, SST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENGETAHUI :</td> <td>VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DIRENCANAKAN :	GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR :	NERLIMAN TAFONAO, SE	JINIS SHM	SMA	DIPERIKSA :	SALLY ADE T ZEBUA, ST		ANDRI JULBERHAN LASE, ST			DISETJUUI :	HARRY PURBA, SST					MENGETAHUI :	VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM				
DIRENCANAKAN :	GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR :	NERLIMAN TAFONAO, SE	JINIS SHM	SMA																				
DIPERIKSA :	SALLY ADE T ZEBUA, ST		ANDRI JULBERHAN LASE, ST																						
DISETJUUI :	HARRY PURBA, SST																								
MENGETAHUI :	VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM																								

Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)



Gambar 1 - Lokasi Proyek

4.2 Kondisi Topografi

Lokasi Pekerjaan Konstruksi berada di sepanjang alinyemen dengan kondisi medan **Berbukit**;

Daerah tangkapan air hujan (*catchment areas*) yang telah diidentifikasi di sepanjang alinyemen lokasi Pekerjaan Konstruksi menentukan adanya rencana konstruksi bangunan pelengkap **saluran drainase disepanjang lokasi penanganan dan bangunan pelengkap seperti box dan gorong-gorong** pada lokasi-lokasi pekerjaan Kondisi tanah **bervariasi**.

4.3 Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini **ruas jalan daerah** berada dalam keadaan **sedang,buruk**. Kondisi tersebut ditandai dengan **ketidakrataan (IRI)** Penilaian kondisi ini terjadi pada **ruas jalan daerah 4 Satker PJN III yang akan ditangani** melalui Kontrak Kerja Konstruksi ini;

4.4 Tahapan Tentatif Kegiatan Konstruksi

Tahapan tentatif pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

No	Lingkup Pekerjaan
1	Mobiliasasi
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
3	Pasangan batu dengan mortar
4	Gorong-gorong Kotak beton bertulang (Box Culvert)
5	- Galian Biasa, - Galian Batu Lunak - Galian Batu
6.	Galian Perkerasan Beraspal/Berbutir
7.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
8.	Lapis Pondasi Agregat Kelas S
9.	Pekerjaan Aspal
10.	Pasangan Batu
11	Marka Jalan termoplastik

Tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang pasti adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak;

4.5 Tipikal Potongan Melintang dan Geometrik

Solusi yang digunakan dalam desain pada gambar potongan melintang adalah **Preservasi jalan daerah -4 Satker PJN III Sumut** sesuai dengan gambar rencana

4.6 Perkerasan

Struktur perkerasan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- Preservasi jalan daerah -4 Satker PJN III Sumut;**

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat -Aspal Cair /Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
3	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

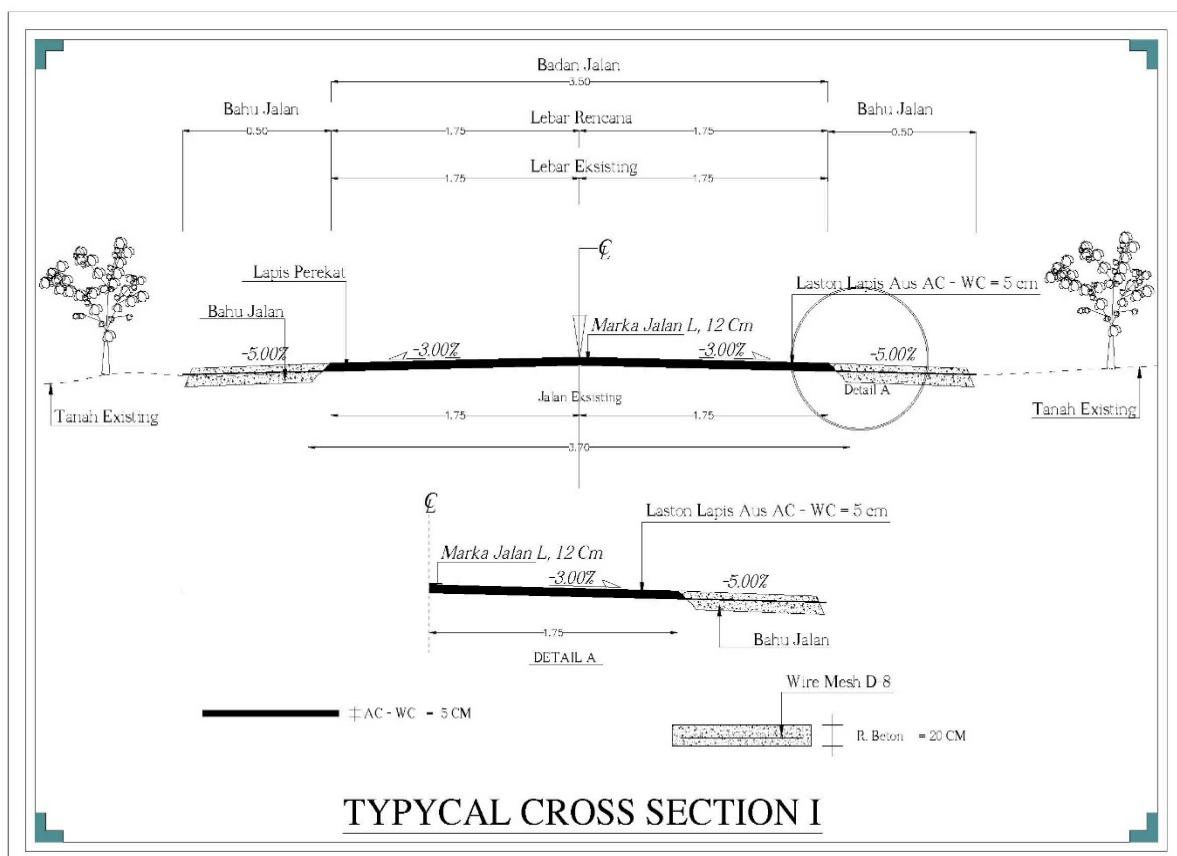
No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab.Nias Selatan)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat -Aspal Cair /Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton
5	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

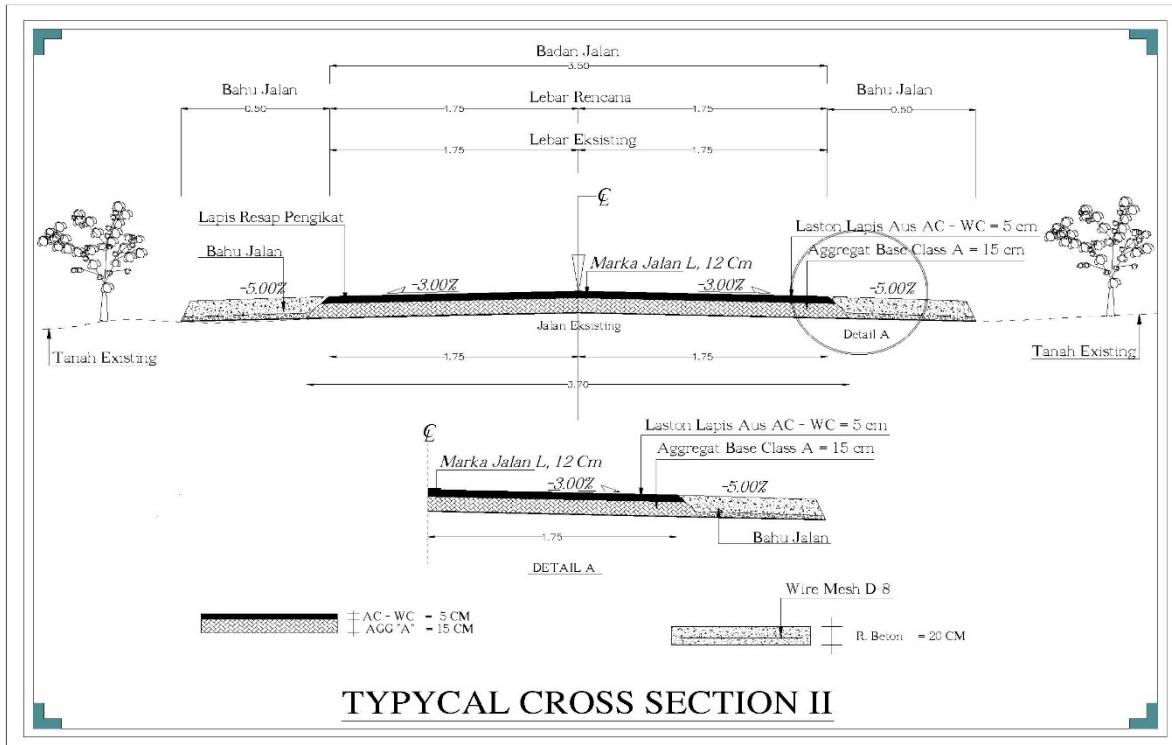
No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Hiiseuba - Daulo (Kab. Nias)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat -Aspal Cair /Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton
5	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat -Aspal Cair /Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton
5	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

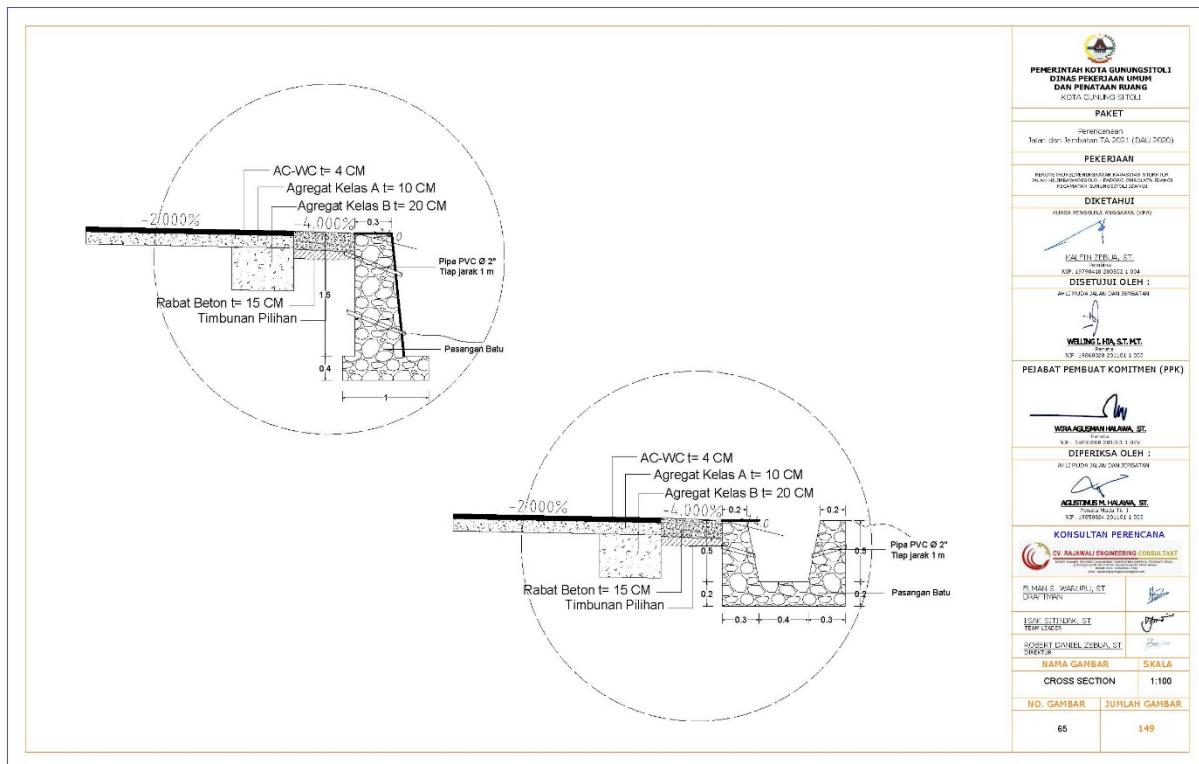
No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/ Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
3	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

Gambar Tipical Potongan Melintang
Preservasi Jalan Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)





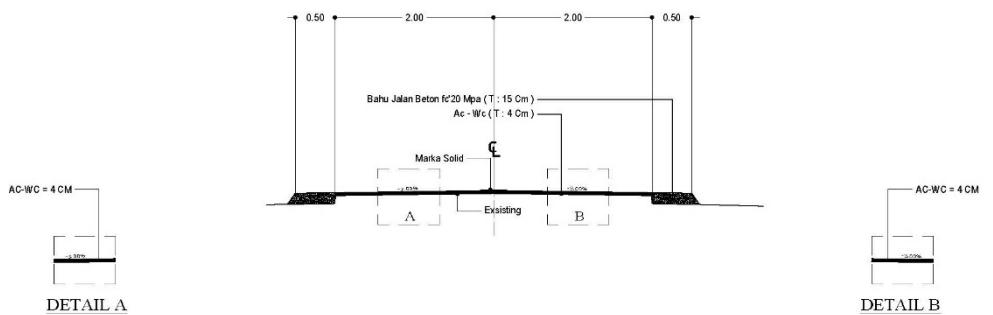
Preservasi Jalan Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)



Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab.Nias Selatan)

 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN Dinas Perindustrian, UMKM dan Perdagangan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	Pelepasan : Preservasi Rekonstruksi Jalan Lahusa - Gomo Lokasi : Kec. Lahusa - Gomo No. Rute : 1 - 7 -	 Perbaikan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	 Perbaikan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	No. Lembar : Jlb. Lembar : Skala :
--	--	--	--	--

RUAS LAHUSA - GOMO (STA 0+00 s/d STA 0+05) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 0+15 s/d STA 0+70) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 0+75 s/d STA 1+02) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+00 s/d STA 1+20) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+20 s/d STA 1+50) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+50 s/d STA 1+70) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+70 s/d STA 1+90) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+90 s/d STA 1+95) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+95 s/d STA 1+98) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+98 s/d STA 1+99) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+99 s/d STA 2+00) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+00 s/d STA 2+05) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+05 s/d STA 2+07) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+07 s/d STA 2+20) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+20 s/d STA 3+00)	RUAS LAHUSA - GOMO (STA 3+575 s/d STA 4+300) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+300 s/d STA 4+225) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+500 s/d STA 4+320) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+650 s/d STA 4+730) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+700 s/d STA 4+760) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+760 s/d STA 4+790) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+900 s/d STA 4+930) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+930 s/d STA 4+950) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+950 s/d STA 4+970) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+970 s/d STA 4+980) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+980 s/d STA 4+990) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 4+990 s/d STA 5+00) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 5+00 s/d STA 5+05) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 5+05 s/d STA 5+10)
--	---

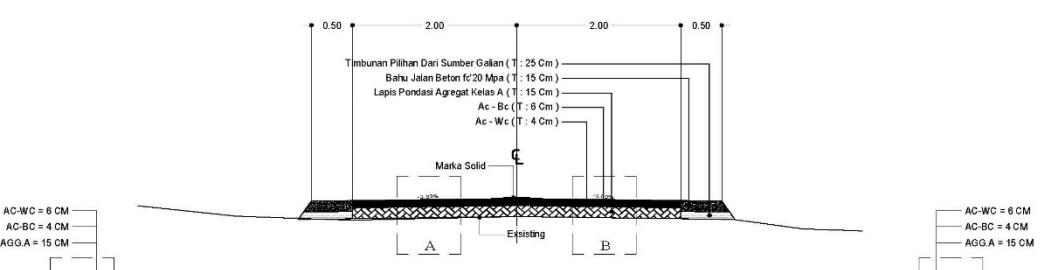


DETAIL A

DETAIL B

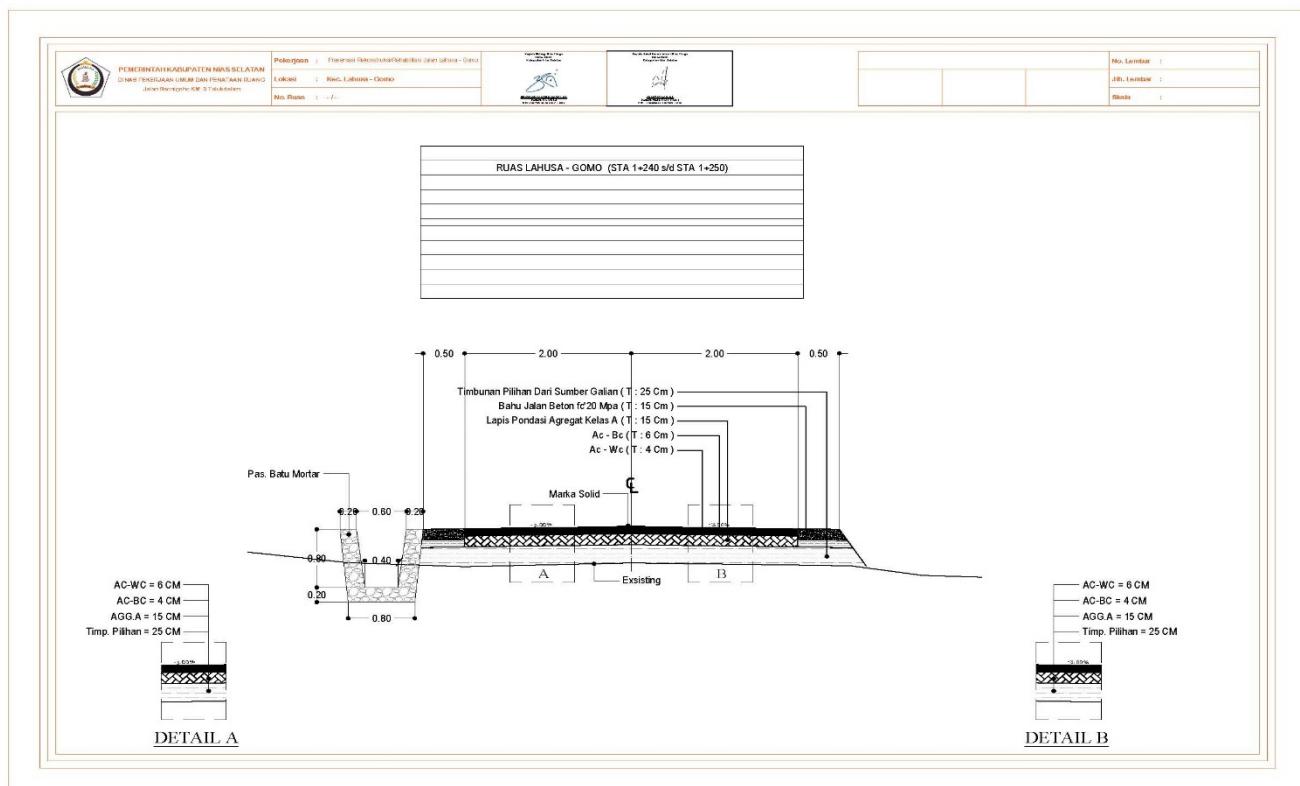
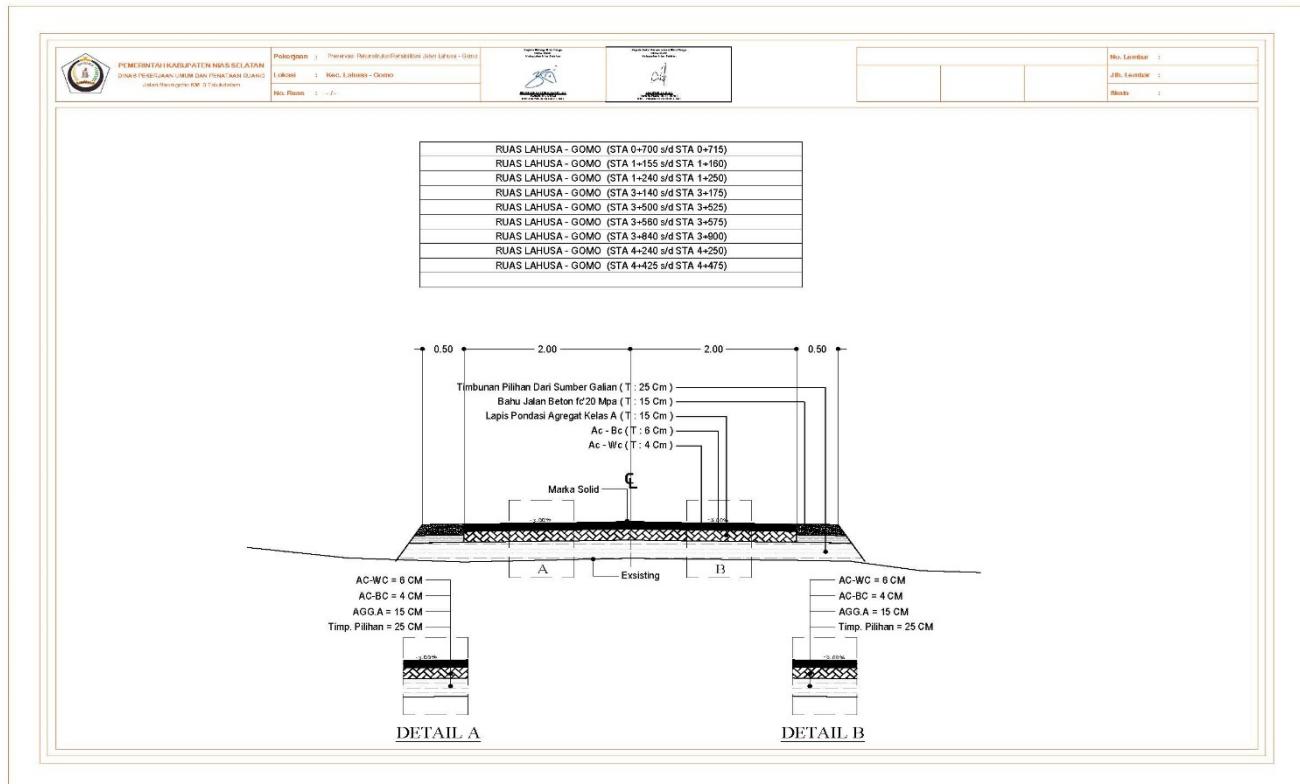
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN Dinas Perindustrian, UMKM dan Perdagangan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	Pelepasan : Preservasi Rekonstruksi Jalan Lahusa - Gomo Lokasi : Kec. Lahusa - Gomo No. Rute : 1 - 7 -	 Perbaikan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	 Perbaikan Jalan Preservasi Jalan Lahusa - Gomo	No. Lembar : Jlb. Lembar : Skala :
--	--	--	--	--

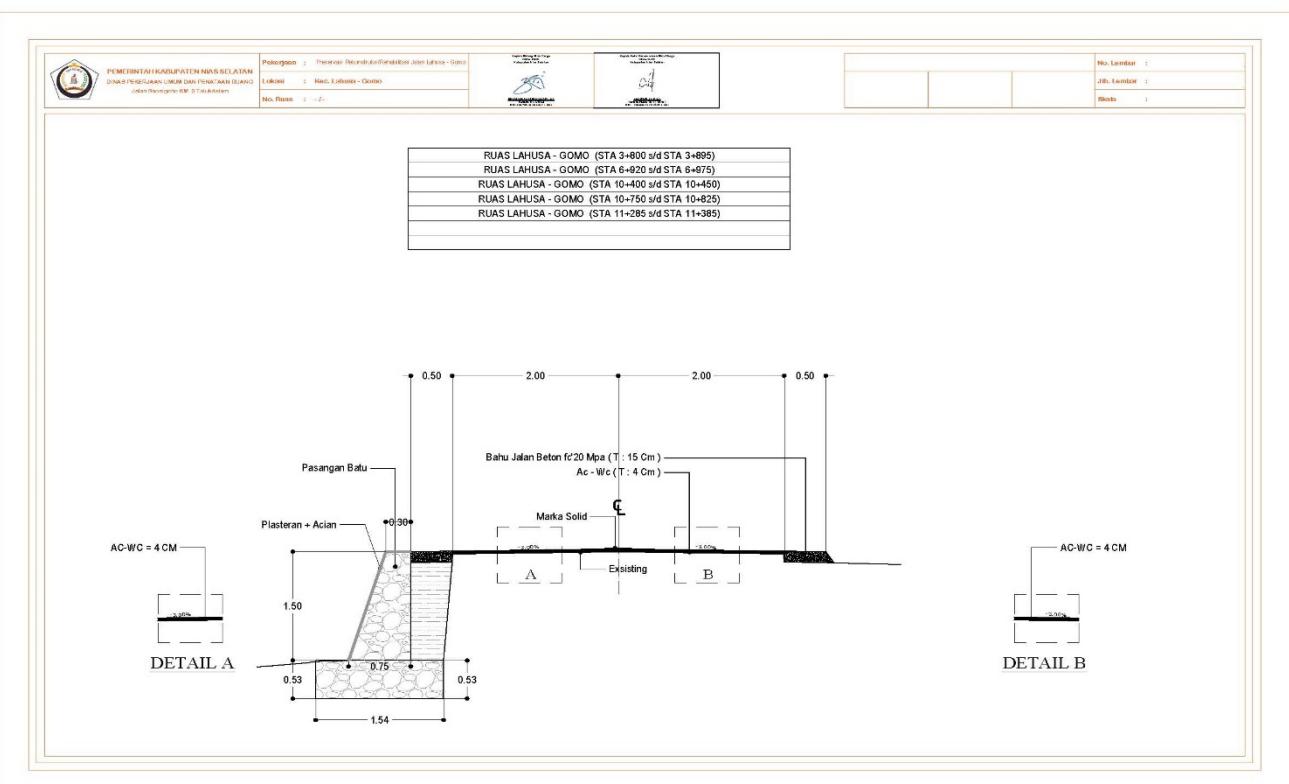
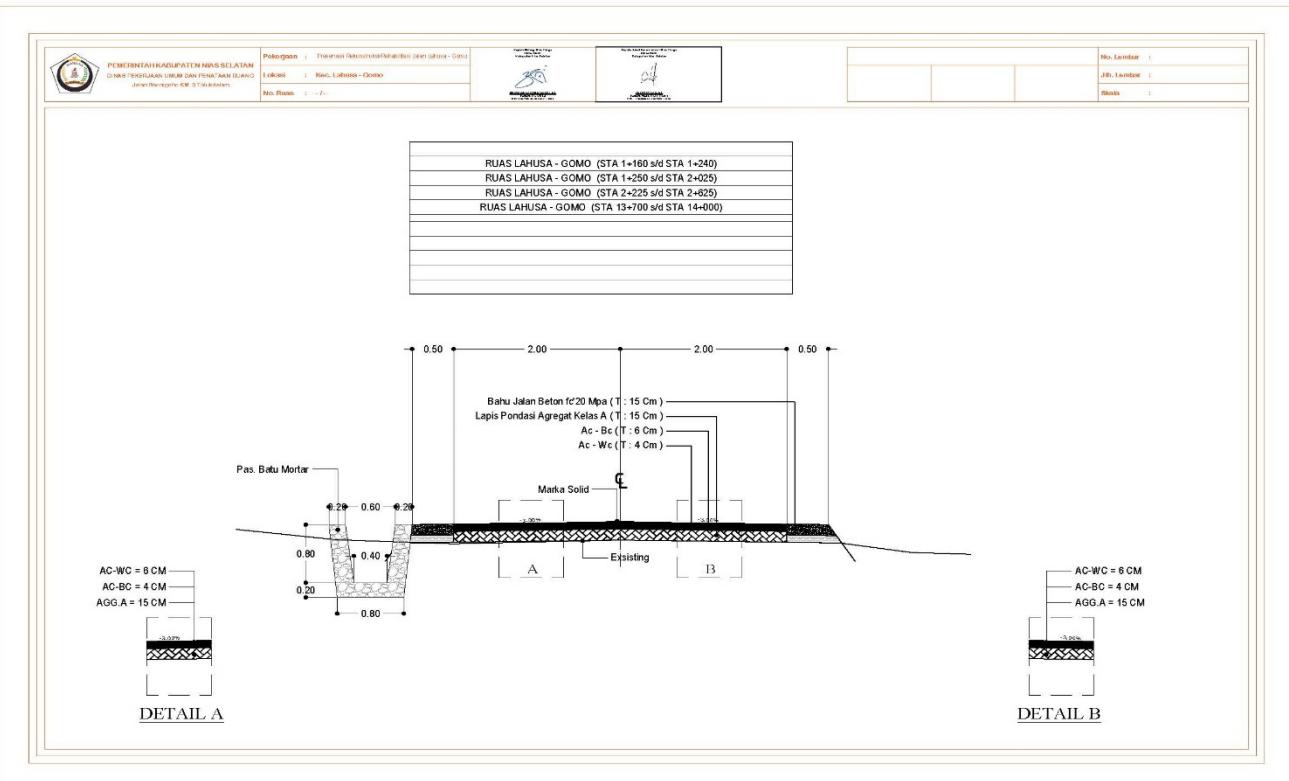
RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+57 s/d STA 1+69) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+69 s/d STA 1+80) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 1+70 s/d STA 2+00) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+10 s/d STA 2+16) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+20 s/d STA 2+26) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+26 s/d STA 2+30) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+30 s/d STA 2+35) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+35 s/d STA 2+40) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+40 s/d STA 2+45) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+45 s/d STA 2+50) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+50 s/d STA 2+55) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+55 s/d STA 2+60) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+60 s/d STA 2+65) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+65 s/d STA 2+70) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+70 s/d STA 2+75) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+75 s/d STA 2+80) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+80 s/d STA 2+85) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+85 s/d STA 2+90) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+90 s/d STA 2+95) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+95 s/d STA 2+98) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 2+98 s/d STA 3+00)	RUAS LAHUSA - GOMO (STA 5+000 s/d STA 5+500) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 5+500 s/d STA 5+600) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+00 s/d STA 6+100) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+100 s/d STA 6+100) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+100 s/d STA 6+105) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+105 s/d STA 6+110) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+110 s/d STA 6+115) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+115 s/d STA 6+120) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+120 s/d STA 6+125) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+125 s/d STA 6+130) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+130 s/d STA 6+135) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+135 s/d STA 6+140) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+140 s/d STA 6+145) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+145 s/d STA 6+150) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+150 s/d STA 6+155) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+155 s/d STA 6+160) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+160 s/d STA 6+165) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+165 s/d STA 6+170) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+170 s/d STA 6+175) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+175 s/d STA 6+180) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+180 s/d STA 6+185) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+185 s/d STA 6+190) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+190 s/d STA 6+195) RUAS LAHUSA - GOMO (STA 6+195 s/d STA 6+200)
--	---

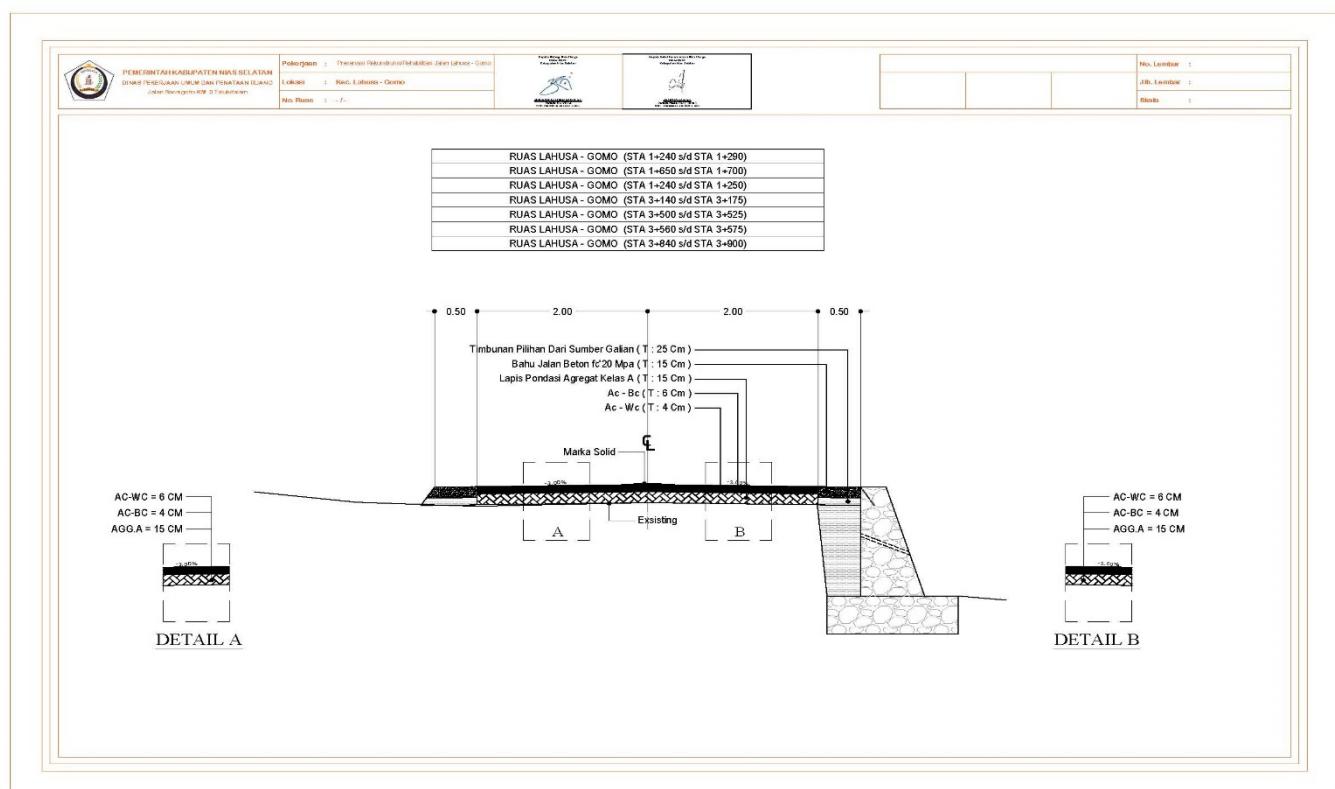
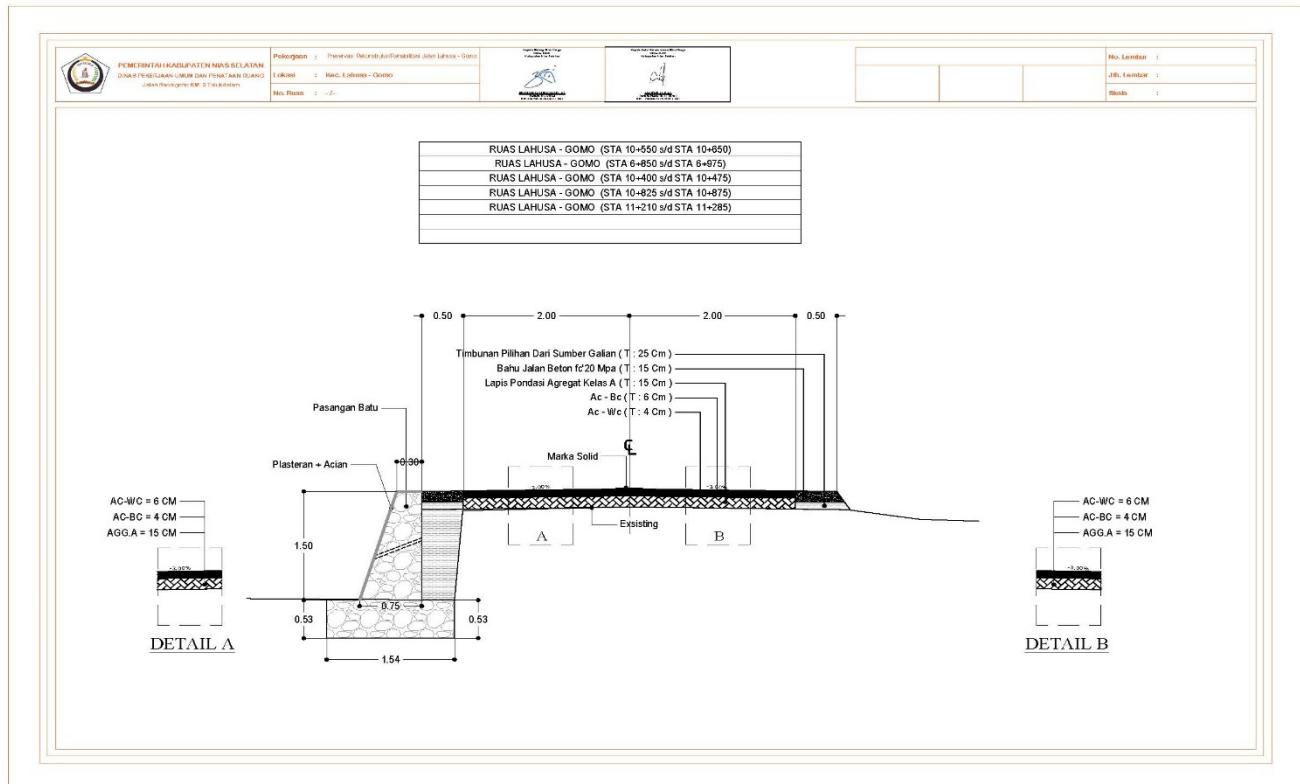


DETAIL A

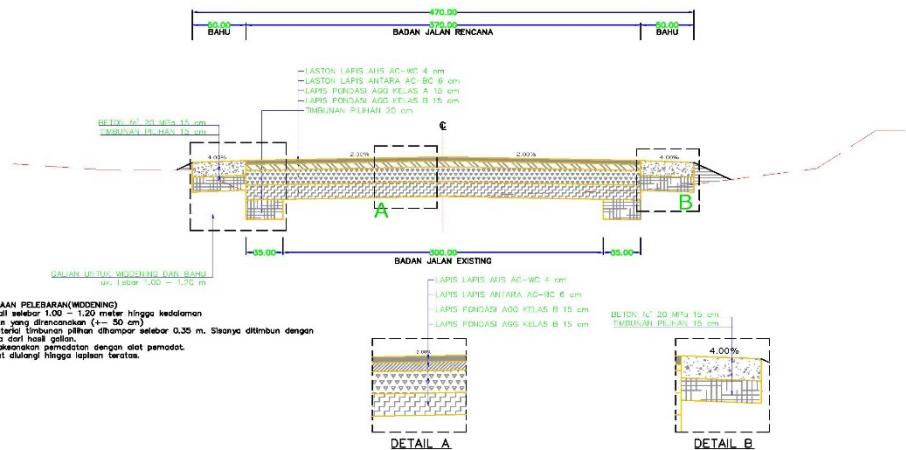
DETAIL B

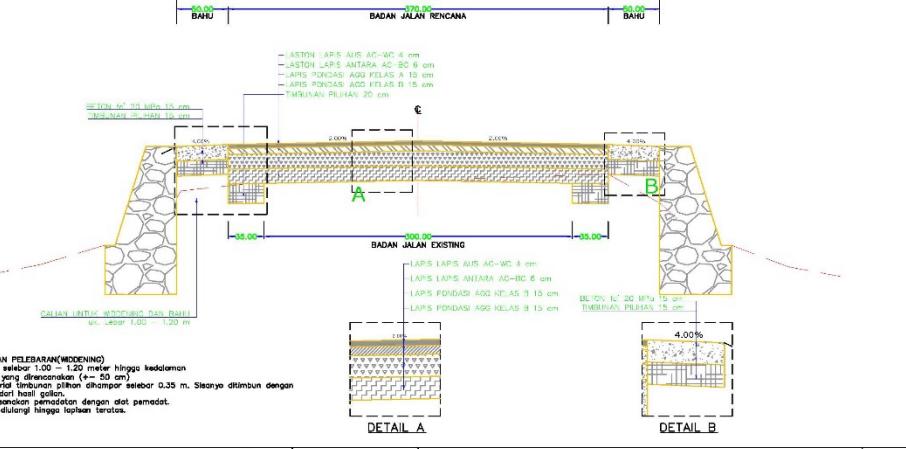






Preservasi Jalan Hiisebua - Daulo (Kab. Nias)

	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS	PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS HILISEBUA - DAULO, KECAMATAN GIDO KECAMATAN : GIDO TAHUN ANGGARAN : 2023 PANJANG : 5,870 Km
TYPIKAL PERKERASAN TYPE 1		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 0+000 s/d 0+500) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 1+300 s/d 1+750) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 1+800 s/d 1+815) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 1+845 s/d 2+000) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 2+160 s/d 2+200) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 2+300 s/d 3+100) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 3+939 s/d 3+943) </div>		
 <p>METODE PELAKUANAN PELEBARAN(WIDENING)</p> <ol style="list-style-type: none"> Batu jalan digali sejauh 1.00 – 1.20 meter hingga kedalam timbunan pihak yang direncanakan (15 cm). Setelah itu dilakukan pemadatan dengan alat pemadat timbunan blok dari hasil galian. Selanjutnya dilakukan pemadatan dengan alat pemadat. Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas. 		
DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST DIPERIKA : SALLY ADE T ZEBUA, ST DISETUJUI : HARRY PURBA, SST MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM	SURVEYOR : NERLIMAN TAFONAO, SE ANDRI JULBERHAN LASE, ST	JUDUL GAMBAR : TYPICAL CROSS SECTION SIRIA :

	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS	PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN RUAS HILISEBUA - DAULO, KECAMATAN GIDO KECAMATAN : GIDO TAHUN ANGGARAN : 2023 PANJANG : 5,870 Km
TYPICAL PERKERASAN TYPE 2		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 0+500 s/d 0+700) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 1+000 s/d 1+300) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 2+000 s/d 2+160) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 2+200 s/d 2+250) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 2+280 s/d 2+300) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 3+100 s/d 3+939) (RUAS) - HILISEBUA - DAULO (STA 3+943 s/d 5+070) </div>		
 <p>METODE PELAKUANAN PELEBARAN(WIDENING)</p> <ol style="list-style-type: none"> Batu jalan digali sejauh 1.00 – 1.20 meter hingga kedalam timbunan pihak yang direncanakan (15 cm). Setelah itu dilakukan pemadatan dengan alat pemadat timbunan blok dari hasil galian. Selanjutnya dilakukan pemadatan dengan alat pemadat. Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas. 		
DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST DIPERIKA : SALLY ADE T ZEBUA, ST DISETUJUI : HARRY PURBA, SST MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM	SURVEYOR : NERLIMAN TAFONAO, SE ANDRI JULBERHAN LASE, ST	JUDUL GAMBAR : TYPICAL CROSS SECTION SIRIA :

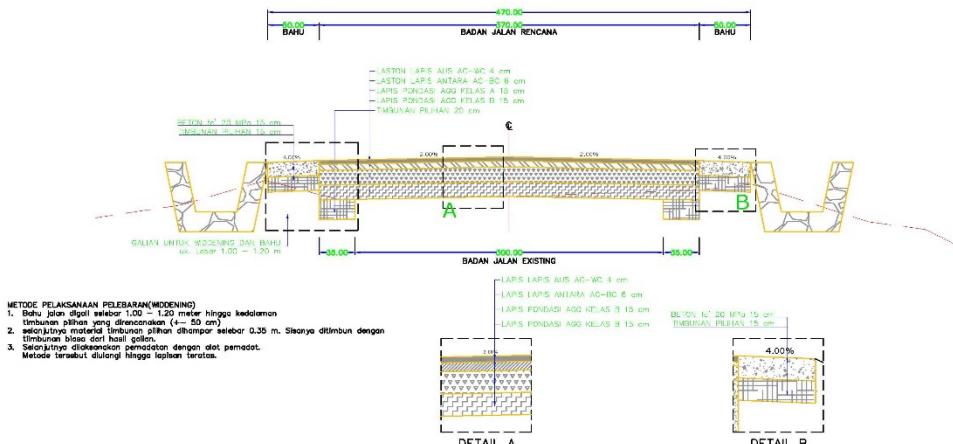


**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAHAN	: PENINGKATAN JALAN RIUHSUBUA - DAULO, KECAMATAN GIDO	NO LEMBAR
KECAMATAN	: GIDO	
TAHUN ANGGARAN	: 2023	
PANJANG	: 5,878 Km	JURUS LEMBAR

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 3

(RUAS) - HILSEBUA - DAULO (STA 0+700 s/d 1+000)



DIRENCANAKAN	: GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR	NERLIAN TAFONAO, SE	JUDUL GAMBAR	SOLAH
DIPERIKSA	: SALLY ADE T ZEBUA, ST		ANDRI JULBERHAN LASE, ST		
DISETUJUI	: HARRY PURBA, SST				
MENGETAHUI	: VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM				

TYPICAL CROSS SECTION

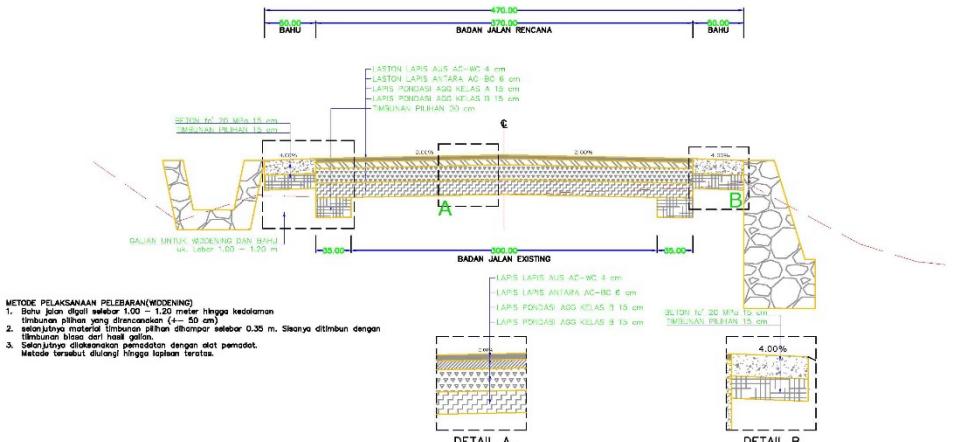
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAHAN	: PENINGKATAN JALAN RIUHSUBUA - DAULO, KECAMATAN GIDO	NO LEMBAR
KECAMATAN	: GIDO	
TAHUN ANGGARAN	: 2023	
PANJANG	: 5,678 Km	

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 4

(RUAS) - HILSEBUA - DAULO (STA 1+750 s/d 1+800)

(RUAS) - HILSEBUA - DAULO (STA 1+815 s/d 1+845)



DIRENCANAKAN	: GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR	NERLIAN TAFONAO, SE	JUDUL GAMBAR	SOLAH
DIPERIKSA	: SALLY ADE T ZEBUA, ST		ANDRI JULBERHAN LASE, ST		
DISETUJUI	: HARRY PURBA, SST				
MENGETAHUI	: VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM				

TYPICAL CROSS SECTION

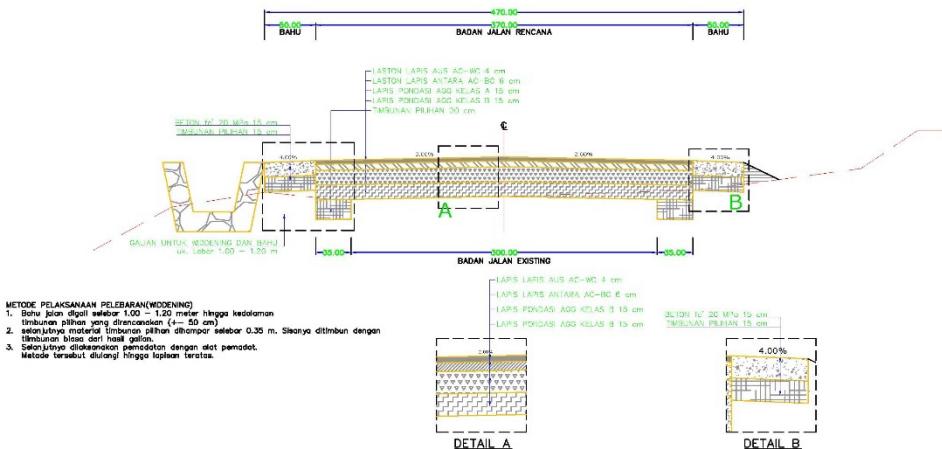


DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS

PEKERJAAN	PENINGKATAN JALAN RIAS HILUSEBUA - DAULO, KECAMATAN GIDO	NO LEMBAR
KECAMATAN	GIDO	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	5,678 Km	

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 5

(RUAS) - HILUSEBUA - DAULO (STA 2+250 s/d 2+280)



DIRENCANAKAN	: GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR	JUMLAH GRIME	SISA
DIPERIKSA	: SALLY ADE T ZEBUA, ST			
DISETUJUI	: HARRY PURBA, SST			
MENGETAHUI	: VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM			

TYPICAL CROSS SECTION

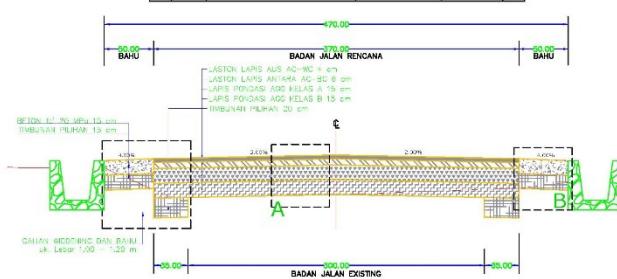
Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS

PEKERJAAN	PENINGKATAN JALAN (HOTBOX) PADA JALAN RIAS WEAWEA - SOMI, KECAMATAN SOGAEADU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEADU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,480 Km	

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 1

(RUAS) - WEA-WEA - SOMI (STA 0+000 s/d 0+100)



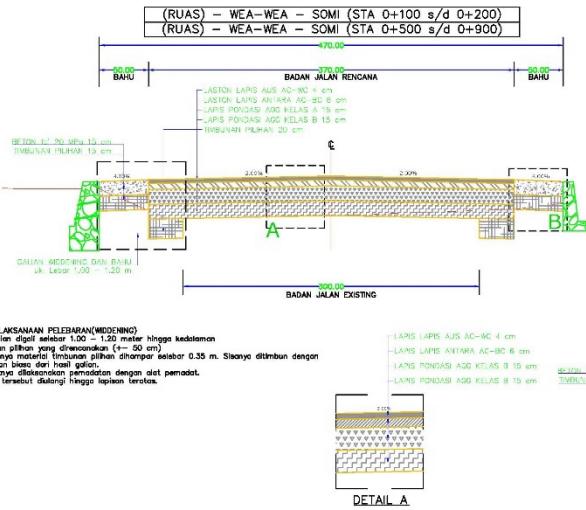
DIRENCANAKAN	: GUNAWAN B HAREFA, ST	SURVEYOR	JUMLAH GRIME	SISA
DIPERIKSA	: SALLY ADE T ZEBUA, ST			
DISETUJUI	: HARRY PURBA, SST			
MENGETAHUI	: VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM			



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUM WEA NGA - SOMI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,486 Km	

TYPICAL PERKERASAN TYPE 2



METODE PEMERAKSAMAAN PELEBARAN(MEDONGAN)
 1. Bahu jalan digali sejajar 1.00 – 1.20 meter hingga kedalaman
 timbunan pilinan yang diworekanan (+= 50 cm)
 2. setelah jalan diperbaiki dilakukan pengaspalan dengan pengaspalan
 timbunan beras dari hasil galan.
 3. Selanjutnya dilaksanakan perakitan dengan set pemadat.
 Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas.

DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
 DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
 DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
 MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

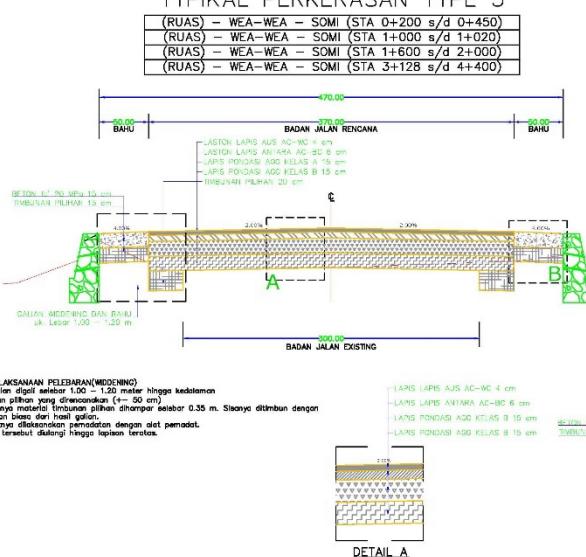
HERLIHAM TAFOANO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDI GENESE, SMM

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUM WEA NGA - SOMI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,486 Km	

TYPICAL PERKERASAN TYPE 3



METODE PEMERAKSAMAAN PELEBARAN(MEDONGAN)
 1. Bahu jalan digali sejajar 1.00 – 1.20 meter hingga kedalaman
 timbunan pilinan yang diworekanan (+= 50 cm)
 2. setelah jalan diperbaiki dilakukan pengaspalan dengan pengaspalan
 timbunan beras dari hasil galan.
 3. Selanjutnya dilaksanakan perakitan dengan set pemadat.
 Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas.

DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
 DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
 DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
 MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

HERLIHAM TAFOANO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

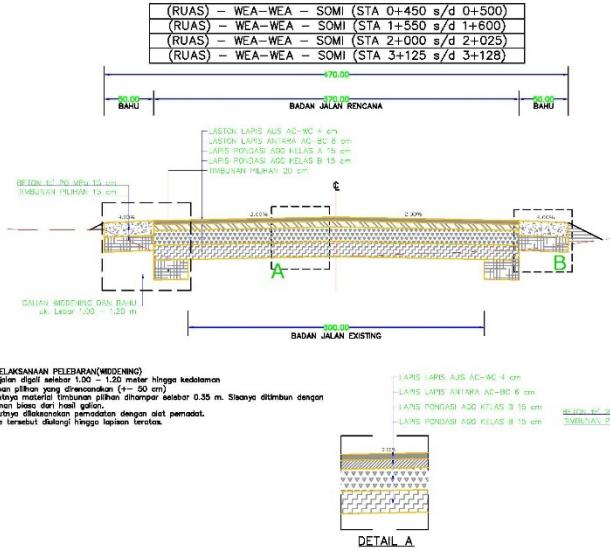
JUDI GENESE, SMM



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTBOX) PADA JALAN RUMA WEA-NGA - SOK. KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,480 Km	

TYPICAL PERKERASAN TYPE 4



DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

NERLIHMAN TAFONAO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

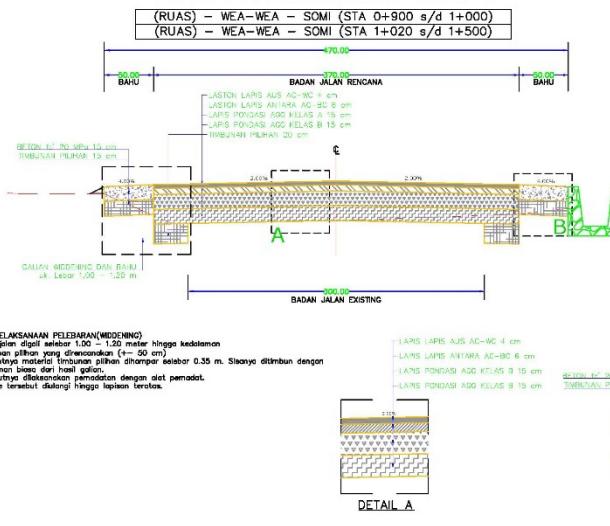
JUDI GENESE

SIMA

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTBOX) PADA JALAN RUMA WEA-NGA - SOK. KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,480 Km	

TYPICAL PERKERASAN TYPE 5



DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

NERLIHMAN TAFONAO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDI GENESE

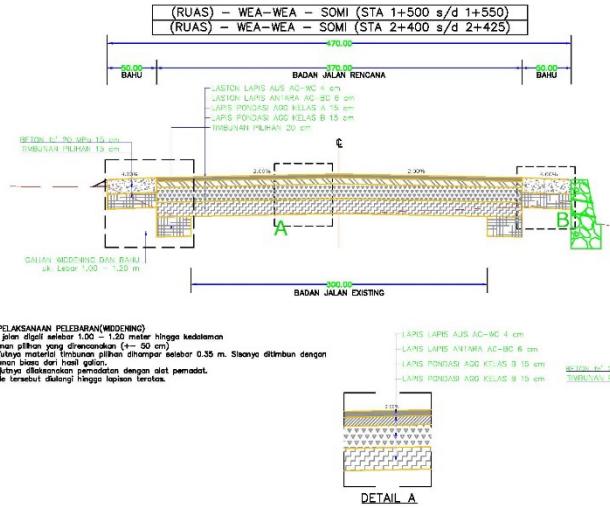
SIMA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS

PEKERJAAN	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUM WEA-NGA - SOKI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	: 4,486 Km	

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 6



DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

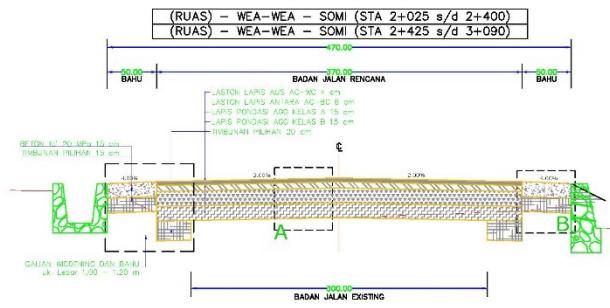
HERLIHAN TAFONAO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDI GENEKI
SMAK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS

PEKERJAAN	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUM WEA-NGA - SOKI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	: 4,486 Km	

TYPIKAL PERKERASAN TYPE 7



DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

HERLIHAN TAFONAO, SE
ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDI GENEKI
SMAK

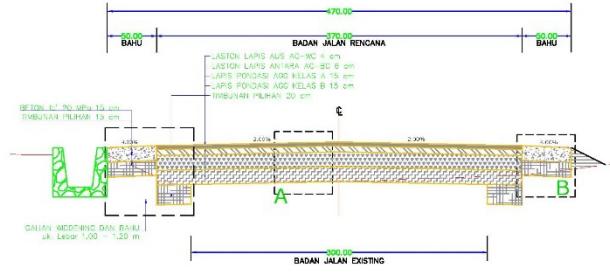


**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUMA WEA-NEA - SOKI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,480 Km	

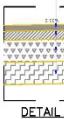
TYPIKAL PERKERASAN TYPE 8

(RUAS) - WEA-WEA - SOKI (STA 3+090 s/d 3+110)



METODE PENGELOMONGAN PELEBARAN (WIDOCHEW)
 1. Bahu jalan digali sejajar 1,00 – 1,20 meter hingga kedalaman
 tumbuhan pilhan yang direkomendasikan (+= 50 cm)
 2. setelah jalan diperbaiki dilakukan pengaspalan dengan lebar
 tumbuhan blok dari hasil galan.
 3. Selanjutnya dilaksanakan perpaduan dengan dat penarif.
 Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas.

LAMIS LAMIS AUS AC-MC 4 cm
 LAMIS LAMIS ANTARA AC-BC 6 cm
 LAMIS PONDASI AGG KELAS B 15 cm
 LAMIS PONDASI AGG KELAS B 15 cm



DETAIL A

DETAIL B

DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
 DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
 DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
 MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

NERLIUMAN TAFONAO, SE
 ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDUL SURVEY	SIMAK
--------------	-------

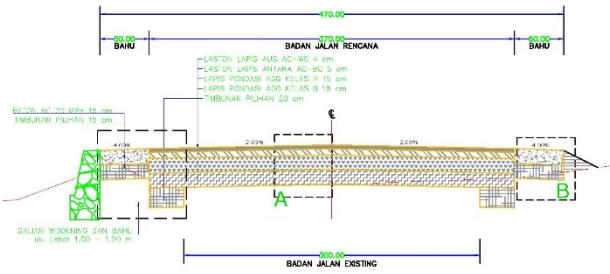


**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS**

PENERJAUH	PENINGKATAN JALAN (HOTEM) PADA JALAN RUMA WEA-NEA - SOKI KECAMATAN SOGAEAU	NO LEMBAR
KECAMATAN	SOGAEAU	
TAHUN ANGGARAN	2023	
PANJANG	4,480 Km	

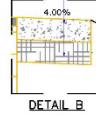
TYPIKAL PERKERASAN TYPE 9

(RUAS) - WEA-WEA - SOKI (STA 3+110 s/d 3+125)



METODE PENGELOMONGAN PELEBARAN (WIDOCHEW)
 1. Bahu jalan digali sejajar 1,00 – 1,20 meter hingga kedalaman
 tumbuhan pilhan yang direkomendasikan (+= 50 cm)
 2. setelah jalan diperbaiki dilakukan pengaspalan dengan lebar
 tumbuhan blok dari hasil galan.
 3. Selanjutnya dilaksanakan perpaduan dengan dat penarif.
 Metode tersebut dilakukan hingga lapisan teratas.

LAMIS LAMIS AUS AC-MC 4 cm
 LAMIS LAMIS ANTARA AC-BC 6 cm
 LAMIS PONDASI AGG KELAS B 15 cm
 LAMIS PONDASI AGG KELAS B 15 cm



DETAIL A

DETAIL B

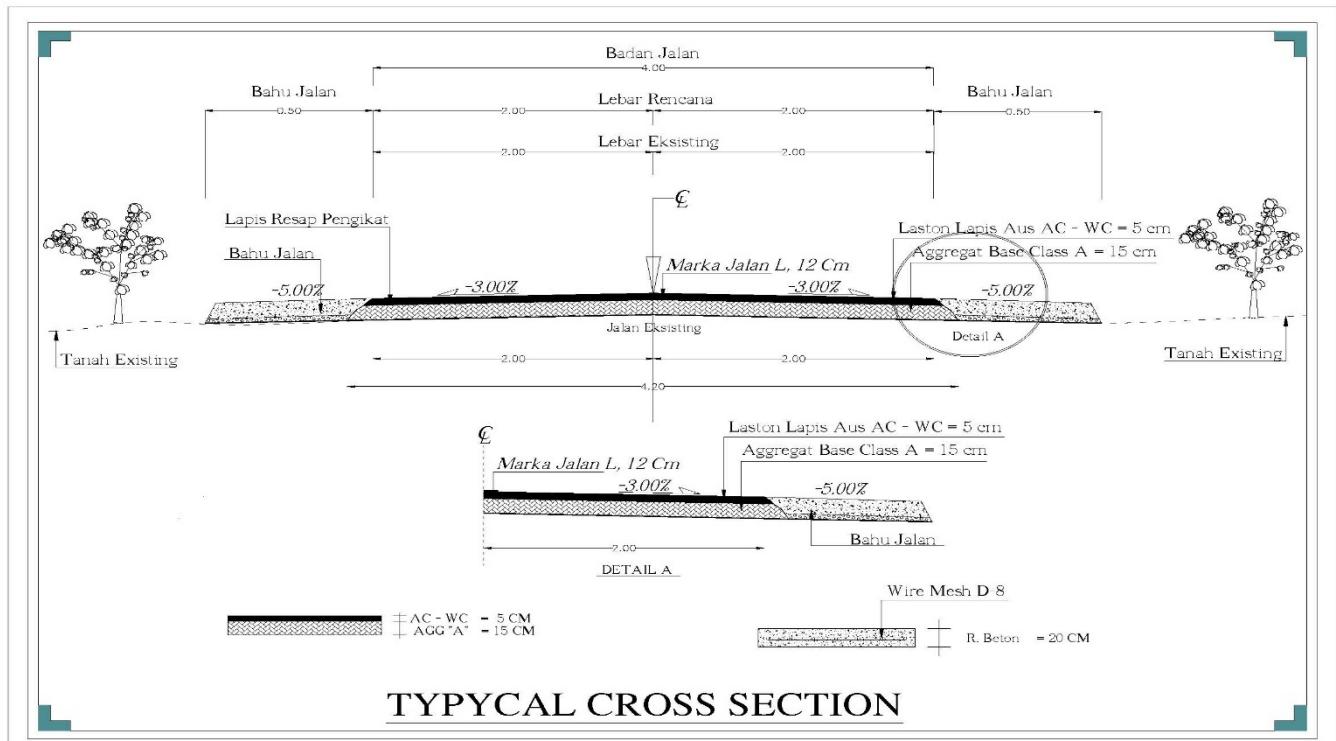
DIRENCANAKAN : GUNAWAN B HAREFA, ST
 DIPERIKSA : SALLY ADE T ZEBUA, ST
 DISETUJUI : HARRY PURBA, SST
 MENGETAHUI : VICTOR SUNARDIN WARUWU, ST., MM

SURVEYOR

NERLIUMAN TAFONAO, SE
 ANDRI JULBERHAN LASE, ST

JUDUL SURVEY	SIMAK
--------------	-------

Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)



Gambar 2 - Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan

4.7 Struktur

Struktur utama yang ditangani mencakup disepanjang ruas Jalan daerah dengan penanganan struktur sebagai berikut:

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Sihene'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)
1.	Beton Fc'20 Mpa	M ³
2.	Anyaman Kawat yang dilas (Welded Wire Mesh)	Kg
3	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Hilimbawadesolo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)
1.	Beton Fc'15 Mpa	M ³
2.	Pasangan Batu	M3

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab. Nias Selatan)
1.	Pasangan Batu	M ³
2.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Hiiseuba - Daulo (Kab. Nias)
1.	Beton Fc'20 Mpa	M ³
2.	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg
3	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)
1.	Beton Fc'20 Mpa	M ³
2.	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)
1.	Beton Fc'20 Mpa	M ³
2.	Anyaman Kawat yang dilas (Welded Wire Mesh)	Kg
3	Pasangan Batu	M ³

4.8 Sistem Drainase

Sistem drainase di sepanjang rute paket Preservasi Jalan daerah 4 Satker PPN III Sumut terdiri dari:

- 1) sistem drainase menggunakan saluran terbuka;

4.9 Pengelolaan Lalu Lintas

No.	Kegiatan Aktifitas	Dampak Pada Lingkungan	Rekomendasi
1.	Jalan Akses kawasan perumahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobilisasi ▪ Pekerjaan Drainase ▪ Pekerjaan Pasangan Batu ▪ Pekerjaan Plat Layanan 	Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan Frekuensi pengangkutan material ke lokasi kegiatan - Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material - Penggunaan truck sedang untuk minimalisasi beban - Setiap Lokasi kegiatan yang sedang dilaksanakan harus menempatkan petugas keamanan untuk mengatur kendaraan masuk dan keluar
2.	Pekerjaan galian Biasa	Gangguan estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan rambu lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti rambu hati – hati, tanjakan, turunan, belokan dan lainnya - Galian tanah langsung diangkut pada hari itu juga guna menghindari penumpukan material; - Membersihkan ceceran tanah sisa material galian
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Timbunan Biasa • Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A 	Gangguan aksesibilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah Dihampar Segera dilakukan Penyiraman dan Pemadatan ▪ Manajemen lalu lintas yang melalui jalan utama dengan Pengalihan rute; Pengaturan lalu lintas
4.	• Pekerjaan Pengaspalan	Gangguan aksesibilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen lalu lintas yang melalui jalan utama dengan Pengalihan rute; Pengaturan lalu lintas

Batasan beban gandar wajib dipatuhi setiap saat oleh Penyedia Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memastikan bahwa Penyedia Konstruksi patuh pada ketentuan yang berlaku untuk setiap kelas jalan yang dilewati untuk pengangkutan/*haulage*.

4.10 Risiko Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi melintasi ***daerah/perkampungan*** yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan/atau ketentuan lainnya. Informasi lebih mendetail tentang Risiko Lingkungan, lihat dokumen Rancangan Konseptual SMKK yang sudah disusun;

No.	Aspek	Deskripsi Awal	Ekomendasi Teknis
1.	Lokasi	a. Kondisi kontur tanah berbukit dengan pola permukiman tersebar b. Kondisi eksisting jalan bervariasi, dengan lebar existing jalan mulai 6-7 meter c. Kondisi trase jalan ada beberapa titik dengan kondisi drainase buruk	a. Kondisi medan jalan, diharapkan semakin baik dan kapasitas meningkat sehingga dapat menunjang percepatan sektor ekonomi. b. Kondisi eksisting jalan dilakukan penanganan secepatnya, melakukan perbaikan jalan. c. Kondisi drainase Direncanakan saluran drainase dengan jenis bangunan saluran mortar baik untuk jalan maupun jembatan.
2.	Lingkungan Fisik	a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan. b. Pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan.	a. Akan ada penanaman pohon pada area proyek. b. Perencanaan sistem drainase, filtrasi, dan run off catchment area
3.	Sosio Ekonomi	a. Keterisolaisian wilayah sehingga penduduk asli yang tersebar tidak merata tertinggal jauh perkembangan ekonominya dari pada penduduk di daerah lain.	a. Untuk Mendorong perekonomian dan mempermudah aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas sosial yaitu, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan.
4.	Dampak Lingkungan	a. Perlu kajian terhadap dampak lingkungan akibat proyek.	a. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak

4.10.1. Lain-Lain

Ciri khusus yang dijumpai di sepanjang rute Pekerjaan Konstruksi adalah:

- Berada di lokasi daerah yang akan menghubungkan dengan jalan kabupaten, provinsi ataupun jalan nasional guna angkutan barang dan manusia dan pemerataan pembangunan daerah;

5 Sumber Pendanaan

- a. Pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan proyek ini didanai oleh **APBN Murni** Tahun Anggaran **2023** dari **Pemerintah Indonesia**, melalui Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara **Satker P2JN**, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
b. Nilai total Pekerjaan Konstruksi ini adalah Rp. **182.176.067.000,-** milyar, mencakup:
 - 1) Pagu Fisik Rp. **176.869.983.823**- milyar untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - 2) Pagu Supervisi Rp. **5.306.099.065,-** milyar untuk Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan; HPS Supervisi Rp. **5.306.099.000,-** milyar untuk Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan;

Dengan kualifikasi Usaha ‘Besar’;

6 Nama dan Rincian PPK, Tata Kelola dan Pengaturan Komunikasi

Rincian PPK serta pengaturan tata kelola proyek dan komunikasi yang lebih luas dijabarkan di bawah ini;

6.1 Rincian PPK

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikelola oleh PPK yang berada di wilayah **Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara** yang selanjutnya disebut Balai.
b. Manajemen dan koordinasi Penyedia Konstruksi dilaksanakan oleh PPK Pelaksana, yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan **Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Utara**.

Nama : **Warmen Sinaga, ST**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen 3.5 Prov. Sumut**

E-mail : **satkerpjn2sumut@gmail.com**

No. HP. : **+62 812-6954-8674**

Nama : **Faber Pangondian, ST**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen 3.6 Prov. Sumut**

E-mail : **faberpandondian@pu.go.id**

No. HP. : **+62 823-9103-4499**

- c. Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan dilaksanakan oleh PPK Pengawasan, yang berada di bawah Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) dan diwakili oleh **PPK Pengawasan**.

Nama : **Mainila Yanti, ST., MT**

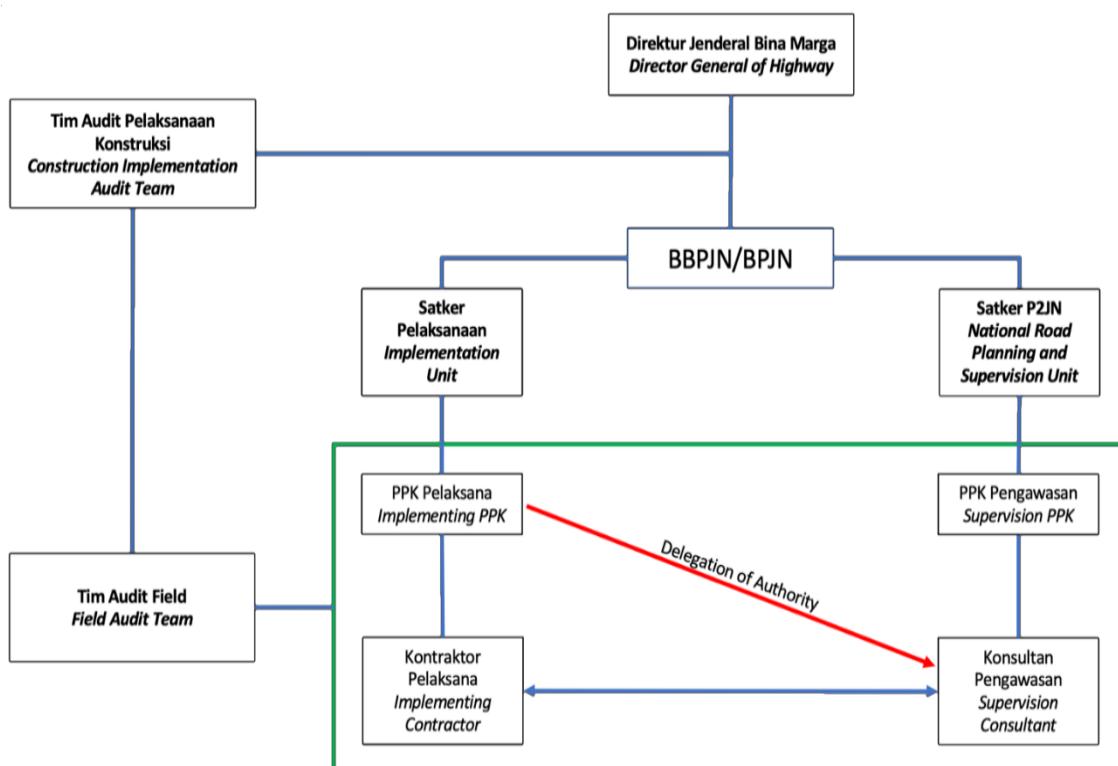
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**

E-mail : **mainilayanti1979@pu.go.id**

No. HP. : **+62811-6388-444**

6.2 Pengaturan Tata Kelola Proyek

- a. Koordinasi antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN berada didalam kewenangan Balai.
- b. Sepanjang masa kerjanya, Konsultan Pengawas wajib bertindak sesuai kewenangan yang didelegasikan/dilimpahkan kepadanya oleh PPK Pelaksana sebelum Tanggal Mulai Kerja.
- c. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk menunjuk/menugaskan Auditor Independen kapan pun selama Masa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Pihak(PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Konstruksi) yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi ini.
- d. Tata kelola selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini ditampilkan pada Gambar ;



Gambar 3 - Pengaturan Tata Kelola;

6.3 Pengaturan Komunikasi

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimile dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Konstruksi.

Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi adalah menetapkan ketentuan protokol korespondensi dan menentukan alat korespondensi yang digunakan dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- a. Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:
 - 1) Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan informasi kepada Para Pihak lainnya;
 - 2) Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan tersampainya informasi;
 - 3) Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan informasi yang disampaikan.
- b. Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan, permohonan, instruksi, anjuran, persetujuan, konsultasi, dan lain-lain.
- c. Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan Rencana Pelibatan dan Komunikasi dengan Para Pihak. Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para Pihak internal dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, peran Para Pihak dalam setiap komponen konstruksi dan/atau hasilnya, serta ketepatan strategi dalam pelibatannya.

- d. Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak internal harus dengan bukti tertulis yang minimal berisi informasi tentang:
 - 1) Pihak Pengirim;
 - 2) Pihak Penerima Utama;
 - 3) Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada Penerima Utama;
 - 4) Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;
 - 5) Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima informasi.
- e. Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa pengiriman ke alamat penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak, disertai bukti penerimaan;
 - 2) Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak;
 - 3) Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang disetujui sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna Jasa.
- f. Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi apabila didukung oleh bukti tertulis dalam bentuk risalah pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima, atau pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang disampaikan oleh Pengirim dan diterima oleh Penerima tidak lebih dari 24 jam setelah komunikasi verbal disampaikan/diterima.
- g. Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama, pada saat yang sama Pengirim harus mengirimkan salinan identik ke semua Pihak Terkait, seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.
- h. Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama dengan Para Pihak menyetujui bahwa semua pemberitahuan, permohonan, dan/atau persetujuan dianggap telah diberitahukan kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai protokol korespondensi di atas.



Gambar 4 - Proses Korespondensi

7 Data Dasar

Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib menggunakan sumber informasi yang tersedia, yaitu:

- a. Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
- b. Kerangka Acuan Kerja;
- c. Kontrak Jasa Konstruksi;
- d. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia Konstruksi selama masa kontrak konstruksi;
- e. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain yang disediakan oleh Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari kontraknya;
- f. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan wawancara;
- g. Informasi yang disediakan PPK;
- h. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;
- i. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak Pekerjaan/Konstruksi;
- j. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan informasi historis lainnya.

8 Standar Teknis

Dalam melaksanakan penugasan ini, Konsultan Pengawas wajib menerapkan standar teknis yang terkait, yaitu:

1. *Surat Edaran Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ)*
2. *Buku Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017;*
3. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, No.038/TBM/1997, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga;*
4. *Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;*
5. *Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan (No.008/T/BNKT/1990);*
6. *Pedoman Perencanaan Sistem Drainase Jalan (Pd. T-02-2006-B);*
7. *SPESIFIKASI UMUM BINA MARGA 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan (Revisi 2), SE Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020;*
8. *Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

9 Studi-Studi Sebelumnya

Konsultan Pengawas harus memperhatikan hasil studi yang telah dilaksanakan sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan:

10 Acuan Hukum

Konsultan Pengawas wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, semua arahan dan keputusan Pengguna Jasa, peraturan perundungan yang berlaku, dan harus menyatakan hal ini dalam kontraknya dengan semua staf/personelnya termasuk pihak subpenyedia dan/atau suplier-nya.

Bila terjadi kesulitan dalam hal ini, maka Konsultan Pengawas wajib berkonsultasi dengan Pengguna Jasa sebelum mengambil tindakan atau menerapkan prosedur apa pun.

Acuan-acuan yang harus diperhatikan adalah :

- a. *Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*
- b. *Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)*
- c. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*
- d. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)*
- e. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*
- f. *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);*

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
- j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514)
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306)
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
- q. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
- r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik;

- s. *Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

11 Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan

11.1 Umum

Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.

Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang diliimpahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan sesuai Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi, maka Konsultan Pengawas wajib Menyusun Program Mutu sebagai jaminan mutu pekerjaan.

11.2 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan Program Mutu

11.2.1 Dasar Perencanaan

Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu merujuk Pasal 16.(1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang sesuai Sublampiran B PMPM PK dan Sublampiran E RMPK yang merupakan persyaratan mutu konstruksi dan metode pembuktian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan Program Mutu Konsultan Pengawas disebut Penjaminan Mutu/*Quality Assurance*.

Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan Pengawas harus memiliki konsep yang jelas tentang perbedaan antara Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* yang merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas dan Pengendalian Mutu yang merupakan tanggung jawab Penyedia Konstruksi.

Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:

- a. Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* (QA) didefinisikan sebagai pelaksanaan program inspeksi dan kendali produksi yang sistematik untuk mencapai standar mutu yang telah ditentukan dan menghindari masalah akibat ketidak-patuhan.
- b. Pengendalian Mutu/*Quality Control* (QC) didefinisikan sebagai prosedur dan praktik yang harus dilakukan untuk memastikan produk atau komponen yang dihasilkan memenuhi atau melampaui ketentuan mutu yang telah ditentukan.

QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu yang diterapkan guna mendukung pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan memastikan bahwa Pekerjaan Konstruksi diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Dengan demikian, QA dan QC merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi.

Konsultan Pengawas wajib menerapkan konsep di atas berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Jasa, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar untuk menyusun Program Mutu Konsultan Pengawas.

11.2.2 Pengenalan Dokumen Pekerjaan Konstruksi

Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mengetahui dokumen Pekerjaan Konstruksi, khususnya:

- a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
- c. Gambar dan model BIM rencana (apabila tersedia), laporan survei, investigasi dan laporan desain yang dibuat Konsultan Perencana;
- d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Konstruksi terutama:
 - 1) Jadwal mobilisasi;
 - 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 3) Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 5) Manajemen peralatan dan bahan;
 - 6) *BIM Execution Plan* (apabila BIM diterapkan); dan
 - 7) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

11.2.3 Program Mutu

Program Mutu harus:

- a. Menguraikan semua kegiatan, seperti korespondensi, inspeksi/pemeriksaan dan pelaporan, yang harus dilakukan agar konstruksi dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan kontrak;
- b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di setiap tahap konstruksi;
- c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir pekerjaan memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasi konstruksi; dan
- d. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan mengatasi perubahan tak terduga yang bisa mempengaruhi mutu konstruksi.

Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu dalam Kontrak Konstruksi, di mana metode pengujian dan pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi merujuk kepada pengelolaan semua sumber daya dan metode yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan hasil akhir pekerjaan (*output*) yang memenuhi persyaratan mutu, selesai tepat waktu dan tepat biaya.

Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi harus diselaraskan. Konsultan Pengawas harus memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi penyesuaian, bila perlu. Penentuan Titik Tunggu perlu diperhatikan secara khusus dalam RMPK Penyedia Konstruksi disesuaikan dengan urutan pekerjaan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus menyelaraskan Program Mutu dengan kemajuan hasil pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan yang disetujui dalam setiap variasi dan/atau pekerjaan tambahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub lampiran-F. Program Mutu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang meliputi komponen-komponen berikut :

- a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan informasi umum tentang proyek, termasuk nama paket, jenis pekerjaan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, kegiatan, masa pelaksanaan kontrak dan informasi umum tentang Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.
- b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu: menjelaskan organisasi dan Tenaga Ahli Inti yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, tanggung jawab dan kewenangan Para Pihak, struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa), kualifikasi, pelatihan dan pengalaman melaksanakan Program Mutu.
- c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap tahap kegiatan, mulai persiapan awal, sampai pelaksanaan, hingga pelaporan. Jadwal Pelaksanaan harus juga mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel.
- d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup layanan Konsultan Pengawasan Konstruksi dan bagan alur proses/tahap pekerjaan terkait dalam melaksanakan penugasannya termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan setiap tahap pekerjaan mencakup:
 - a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur umum untuk pemeriksaan kualitas dan kegiatan verifikasi yang sesuai ketentuan kontrak pekerjaan konstruksi;
 - b) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur mengatasi masalah ketidakpatuhan, mulai dari identifikasi awal sampai penerimaan tindakan perbaikan;
 - c) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan pendekatan Penjaminan Mutu yang memenuhi ketentuan pemantauan kinerja;
 - d) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang digunakan untuk menentukan dan penjaminan mutu pada titik tunggu;
 - e) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial;
 - f) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan kiriman dari Penyedia Konstruksi;
 - g) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan pengelolaan dokumen proyek dengan sistem pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang aman;

- h) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur untuk memberikan dan mendapatkan semua persetujuan;
 - i) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur perubahan Program Mutu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan Penjaminan Mutu;
- 2) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya; dan
 - 3) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan yang disebutkan dalam kontrak Konsultan Pengawas.
- e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana, metodologi, persyaratan pekerjaan, serta sumber daya personel dan peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi, kriteria penerimaan dan acuan informasi. Pengendalian pekerjaan ini dapat dibuat dalam bentuk daftar simak/*checklist*.
 - f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus diserahkan berikut jadwal penyerahannya.

Program Mutu Konsultan harus disusun berdasarkan dokumen RMPK Penyedia Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua dokumen tersebut (Program Mutu dan RMPK) harus selaras.

Pada tahap awal penyusunan Program Mutu, Konsultan Pengawas memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi perubahan, jika perlu. Perubahan lebih lanjut terhadap Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi dapat dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna mengakomodir perubahan pada ruang lingkup pekerjaan.

11.3 Pelaksanaan Program Mutu

Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu/QA secara sistematis. Program Mutu harus terus-menerus dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar bisa merespons kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.

Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi adalah “Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu” dan “Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, seperti dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini.

Dalam pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mewakili kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pelimpahan Wewenang.

11.4 Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu

Tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninjau dan memberikan rekomendasi persetujuan Pengguna Jasa atas usulan jadwal pekerjaan dan perubahannya, serta rencana atau program lainnya yang dibuat oleh Penyedia Konstruksi;
- b. Menilai kelayakan semua sumber daya seperti material, tenaga kerja dan peralatan yang disiapkan Penyedia Konstruksi serta metode pelaksanaan pekerjaan terkait rencana kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan mengambil tindakan untuk mempercepat kemajuan pekerjaan;
- c. Melakukan inspeksi lapangan secara teratur melalui kunjungan harian ke lokasi konstruksi, fasilitas produksi, fasilitas pengujian, tempat menginap di lapangan, tempat penyimpanan dan fasilitas-fasilitas lain, serta lingkungan di luar lokasi pekerjaan yang dapat terkena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh pekerjaan konstruksi;
- d. Memantau dan memperbarui secara berkala daftar personel, serta peralatan dan kondisinya yang disediakan Penyedia Konstruksi di lapangan untuk memastikan kepatuhan dengan daftar peralatan Penyedia Konstruksi pada saat pengadaan;
- e. Secara berkala memeriksa tingkat kepatuhan Penyedia Konstruksi dengan kriteria kinerja yang ditetapkan / tingkat layanan jalan atau aset lainnya dan mengusulkan tindakan perbaikan (jika perlu);
- f. Melakukan inspeksi terhadap Titik Tunggu dan memberikan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya bila hasil inspeksi memenuhi ketentuan mutu serta ketentuan lain yang terkait;
- g. Memeriksa laporan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang disampaikan Penyedia Konstruksi dan mengajukan tindakan-tindakan perbaikan;
- h. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap semua klaim dari Penyedia Konstruksi untuk variasi, perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan yang harus dilakukan kemudian serta biaya atau hal lainnya yang serupa;
- i. Memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disetujui dan disepakati serta melakukan pengecekan, menyetujui, dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap pengajuan tagihan Penyedia Konstruksi atas prestasi hasil pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan dokumen pendukungnya;
- j. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada Pengguna Jasa yang berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kinerja Penyedia Konstruksi, mutu pekerjaan, efektivitas pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta status dan perkiraan arus keuangan;
- k. Mengusulkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa tentang perubahan yang dipandang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan serta informasi tentang dampak setiap perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan, serta mempersiapkan semua variasi yang harus dilakukan termasuk mengubah rencana dan spesifikasi serta rincian lainnya, menginformasikan Pengguna Jasa tentang setiap masalah atau potensi masalah yang terkait kontrak serta merekomendasikan solusi yang mungkin dilakukan;
- l. Menyusun dan mengarsipkan catatan inspeksi mutu, kemajuan dan kinerja pekerjaan konstruksi;
- m. Memeriksa gambar kerja dan rencana kerja Penyedia Konstruksi;
- n. Memeriksa pelaksanaan dan hasil survei yang dilakukan Penyedia Konstruksi terhadap alinyemen garis *centerline*, lokasi konstruksi/struktur, titik kontrol pengukuran dan *benchmark*;

- o. Memeriksa kesesuaian rencana pengujian material oleh Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya;
- p. Mengadakan pertemuan lapangan secara berkala (bulanan atau dua mingguan) bersama Penyedia Konstruksi, Pengguna Jasa, dan semua Para Pihak terkait yang dipimpin oleh Konsultan Pengawas; dan
- q. Melaksanakan pekerjaan yang tidak disebut secara khusus di atas, namun penting dilakukan untuk keberhasilan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu sehingga pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan persyaratan kontrak.
- r. Apabila BIM diterapkan, Konsultan Pengawas bertugas untuk membantu Pengguna Jasa dalam memastikan proses kolaborasi dan manajemen seluruh data yang berkaitan dengan pekerjaan dan terlampir di KAK berjalan dengan baik di *platform* kolaborasi/CDE Bina Marga. Selain itu, konsultan pengawas juga bertugas untuk memastikan Penyedia Konstruksi mampu menerapkan BIM berdasarkan Tata Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga dan BEP yang telah disepakati.

11.5 Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas harus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial. Tanggung jawab Konsultan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) yang didalamnya termasuk aspek Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial (GESI) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP), menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan, termasuk perubahannya untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang harus disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- c. Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - a. Keselamatan keteknikan konstruksi;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Keselamatan publik; dan
 - d. Keselamatan lingkungan.
- d. Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan yang terkait dengan gender dan aksesibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk seluruh stafnya;
- e. Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi pada Rencana Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi sosial serta risiko-risiko yang terkait;
- f. Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu ketidak-patuhan dan keluhan-keluhan yang diterima;
- g. Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

- h. Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan konstruksi, melaporkan dampak tersebut berikut langkah-langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan bulanan (jika ada);
- i. Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi pada keanekaragaman hayati serta mitigasinya; dan
- j. Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi atas metode dan prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan semua langkah telah diambil untuk melindungi jiwa dan properti.

11.6 Dukungan Teknis dan Manajemen

Konsultan Pengawas harus mendukung Pengguna Jasa dalam mengelola Pekerjaan Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan ringkas tentang kinerja Pekerjaan Konstruksi serta hasilnya kepada Pengguna Jasa, dan memberikan masukkan untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangan Konsultan Pengawas dan menyiapkan semua material pendukung yang diperlukan.

Tanggung jawab Konsultan Pengawas termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Menyerahkan hasil pengukuran dan pengujian pekerjaan;
- b. Memberikan perintah perbaikan dan validasi cacat mutu;
- c. Membuat dan menyerahkan laporan ketidakpatuhan;
- d. Memberikan informasi dan masukkan yang relevan untuk memperbarui RMPK Penyedia Konstruksi, jadwal pekerjaan serta titik-titik tunggu;
- e. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan perbaikan;
- f. Merekomendasikan tindakan yang perlu diambil yang merupakan kewenangan eksklusif Pengguna Jasa;
- g. Merekomendasi perubahan kontrak serta pengaturan-pengaturan lain yang terkait;
- h. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif terhadap masa pelaksanaan pekerjaan, termasuk masukkan untuk mengelola kontrak kritis dan persiapan serah terima pekerjaan konstruksi; dan
- i. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif terhadap biaya konstruksi, termasuk memverifikasi tagihan Penyedia Konstruksi, penyiapan variasi dan adendum kontrak, serta penyiapan status arus keuangan kontrak pekerjaan konstruksi secara berkala.

11.7 Pelaporan dan Dokumentasi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan jadwal pelaporan dan laporan khusus sesuai Ketentuan pada Bagian 18, Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan. Konsultan Pengawas harus memperbarui arsip dan dokumentasi selama masa pelaksanaan pekerjaan.

Apabila BIM diterapkan, proses penyampaian, reviu, dan persetujuan Laporan Rutin dan Dokumentasi oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform kolaborasi/CDE Bina Marga* sesuai dengan sistematika alur (*flow*) yang sudah disepakati.

Ketentuan laporan dan dokumentasi diuraikan pada Bagian 20 hingga 22. Ketentuan dokumentasi lainnya diuraikan di bawah ini.

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan berikut:

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Rencana Mutu Kontrak (RMK), dan Program Mutu
- c. Laporan Kemajuan

11.7.1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana berikut:

- a. Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Konstruksi
- b. Laporan Kemajuan Bulanan Pekerjaan Konstruksi
- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

11.7.2. Laporan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan kemajuan pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi berikut:

- a. Laporan Kemajuan Bulanan
- b. Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi
- c. Laporan Akhir

11.7.3. Laporan Lainnya

Laporan khusus menjadi wajib dalam jangka waktu penyediaan layanan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:

a. Laporan Ketidakpatuhan/Ketidaksesuaian

Selama pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian antara persyaratan/ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan pelaksanaan di lapangan. Bila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Konsultan Pengawas harus membuat Laporan Ketidaksesuaian/Ketidakpatuhan yang merinci jenis, sifat dan besaran ketidaksesuaian serta menyerahkannya kepada Penyedia Konstruksi dan Pengguna Jasa.

b. Laporan Khusus

Laporan khusus mencakup rincian kejadian, kegiatan, atau kondisi di luar ketentuan cakupan pelaporan normal, misalnya laporan yang terkait dengan permasalahan teknis, penanganan *black-spot* dan lainnya. Selanjutnya, laporan khusus harus disiapkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan permintaan Pengguna Jasa.

11.7.4. Dokumentasi

Dokumen yang harus disiapkan sebagai bagian rutin pelaksanaan penyediaan layanan:

a. Catatan Harian Konstruksi (Laporan Harian)

Catatan Harian Konstruksi berisi Laporan Harian yang mencakup informasi tentang kondisi, cuaca, personel dan peralatan di lokasi kerja, pekerjaan dan pengujian yang dilakukan/disampel dan disetujui/ditolak, material, dll.

Laporan Harian disusun oleh Penyedia Konstruksi, dan Konsultan Pengawas bertugas memverifikasi informasi dan mengkomunikasikannya dengan Penyedia Konstruksi melalui instruksi/masukkan. Keakuratan informasi yang terkandung dalam Laporan Harian dikonfirmasi melalui tanda tangan perwakilan resmi Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.

Salinan Laporan Harian dipegang oleh Konsultan Pengawas, sedangkan arsip asli dipegang Penyedia Konstruksi. Konsultan Pengawas harus menyerahkan salinan Laporan Harian kepada Pengguna Jasa pada akhir masa kontrak.

b. Hasil Pengujian

Salinan hasil pengujian yang dilaksanakan Penyedia Konstruksi, sub-Penyedia Konstruksi, Konsultan Pengawas atau laboratorium independen harus disimpan dan diarsipkan oleh Konsultan Pengawas selama masa kontrak.

c. Risalah Rapat Kemajuan

Konsultan Pengawas harus mengumpulkan dan mengarsipkan semua Risalah Rapat Kemajuan Pekerjaan Konstruksi. Keakuratan informasi yang terkandung dalam Risalah Rapat dikonfirmasi dengan tanda tangan perwakilan resmi Para Pihak yang menghadiri rapat.

d. Pendataan Surat Menyurat Pekerjaan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus mengarsipkan semua korespondensi/surat-menyurat yang dikirim dan diterima.

e. Dokumen lain

Konsultan Pengawas harus mengarsipkan catatan tentang semua dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, yaitu pemberitahuan, permohonan, persetujuan, gambar, informasi dan dokumen lainnya.

12 Keluaran/*Output*

Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi ini, Konsultan Pengawas wajib menghasilkan keluaran/*output* berdasarkan keahlian terpadu di setiap tahap pekerjaan. Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Rencana Mutu (Titik Tunggu, Daftar Simak Pengujian Mutu), termasuk pemutakhirannya;
- b. Rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran RMK Kontraktor;
- c. Hasil Kajian Kepatuhan Rencana Mutu yang dilaksanakan secara berkala;
- d. Hasil Pengujian Acak;
- e. Catatan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu (Laporan Ketidakpatuhan);
- f. Perubahan pada proses implementasi dan/atau kendali mutu;
- g. Rekomendasi atau instruksi untuk perbaikan pekerjaan;
- h. Catatan input untuk pemutakhiran Rencana Kendali Mutu Kontraktor;
- i. Hasil pengolahan data/informasi kendali mutu;
- j. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- k. Laporan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; dan
- l. Laporan lainnya.

Apabila menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu dan persetujuan seluruh output yang tertulis di atas oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform* kolaborasi/CDE Bina Marga sesuai dengan sistematika *flow* yang sudah disepakati

13 Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas yang Disediakan Pengguna Jasa

Penggunaan fasilitas, peralatan, dan hal-hal yang merupakan milik Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Konstruksi perlu diatur secara khusus agar dapat digunakan oleh

Konsultan Pengawas selama masa pelaksanaan pekerjaan, seperti dijabarkan di bawah ini.

PPK menyediakan hal-hal berikut:

- a. Peralatan dan Material yang disediakan PPK untuk digunakan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut : Staf Pengawas/ Pendamping

Dalam menjalankan tugasnya Penyedia Jasa Konsultansi harus selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Konsultan *Core Team*, Project Officer (PO) Satker P2JN yang ditunjuk, serta PPK Pekerjaan Konstruksi dan/atau staf pengawas yang ditunjuk

- b. Tenaga Pengawas / Asistensi (bila ada)

14 Peralatan dan Jasa yang Disediakan Konsultan Pengawas Pekerjaan

Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas wajib menyiapkan fasilitas kantor dan melaksanakan manajemen yang baik sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, Konsultan Pengawas harus menyediakan perlengkapan tertentu serta sejumlah peralatan pendukung.

Hal-hal yang disediakan Konsultan Pengawas adalah:

- a. Biaya Langsung Non-Personel harus disediakan dan dibayar terpisah (sesuai jenisnya dalam Daftar Kuantitas dan Harga) yaitu:

- 1) *Kantor dan Fasilitas kantor, akomodasi untuk staf Konsultan Pengawas yang jaraknya tidak lebih dari 100 km atau 2 jam perjalanan mobil dari lokasi kerja;*
- 2) *Fasilitas Laboratorium Thermometer Aspal sebanyak 5 bh;*
- 3) *12 (dua belas) kendaraan roda empat untuk transportasi staf dan peralatan;*
- 4) *18 (delapan belas) kendaraan roda dua untuk transportasi staf dan peralatan;*
- 5) *Laptop, 6 Unit (termasuk jaringan koneksi yang dibutuhkan untuk pengoperasian), printer 6 Unit dan semua perangkat serupa;*
- 6) *Perlengkapan, peralatan dan fasilitas kantor serta akomodasi yang responsif terhadap kebutuhan gender;*
- 7) *Bahan dan peralatan kantor;*
- 8) *Peralatan dan biaya komunikasi;*
- 9) *Biaya perjalanan staf untuk kepentingan Pekerjaan Konstruksi;*
- 10) *Biaya produksi dan penyampaian semua pelaporan dan pengiriman terkait Pekerjaan Konstruksi lainnya.*

- b. Peralatan yang disediakan Konsultan Pengawas harus cukup memadai sehingga pengawasan dan pemantauan pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Peralatan uji minimum yang harus disediakan oleh Konsultan Pengawas adalah:

- 1) *Peralatan dasar untuk melaksanakan pengukuran dimensi – meteran/ calipers/ roda pengukur;*
- 2) *Peralatan dasar untuk pengujian material : timbangan,/ termometer aspal;*
- 3) *Peralatan Survey Drone apabila dibutuhkan;*

Peralatan ini tidak dibayar terpisah berdasarkan Kontrak dan semua biaya terkait dianggap sudah dimasukkan dalam *item* lain pada Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan Konsultan Pengawas.

c. Fasilitas yang disediakan oleh Konsultan Pengawas dan tidak dibayar terpisah (biaya terkait dimasukkan dalam harga item lain) adalah sebagai berikut:

- 1) *Perlengkapan penunjang Notes/Buku catatan;*
- 2) *Kacamata safety;*

d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terutama di lokasi-lokasi pekerjaan seperti diuraikan pada Bagian 4.

Konsultan Pengawas melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi pekerjaan/kantor/lembaga/instansi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, sesuai dengan ketentuan pada Bagian 4 Kerangka Acuan Kerja ini. Lokasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) *Kantor Pengguna Jasa/PPK;*
- 2) *Kantor Penyedia Konstruksi (termasuk kantor lapangan dan kantor utama);*
- 3) *Kantor perwakilan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga pemerintah*
- 4) *Akomodasi lapangan dan fasilitas penyimpanan/storage Penyedia Konstruksi;*
- 5) *Fasilitas produksi dan/atau pencampuran Penyedia Konstruksi, seperti quarry, stone crusher, asphalt mixing plant, concrete batching plant, laboratorium dan lain-lain;*
- 6) *Fasilitas apa pun yang dimiliki anggota konsorsium Penyedia Konstruksi, sub-Penyedia Konstruksi, suplier lokal atau pihak lain yang termasuk dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi.*

Semua pengaturan transportasi dan logistik yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan yang dimaksud merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas. Biaya semua perjalanan ke dan dari lokasi-lokasi tersebut, serta biaya terkait, seperti akomodasi, tidak dibayar terpisah dan dianggap sudah dimasukkan dalam *item* lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.

15 Kewenangan Konsultan Pengawas Pekerjaan

Untuk tujuan penyediaan jasa yang dijabarkan sebelumnya, Konsultan Pengawas diberikan kewenangan berikut;

:

- a. Memeriksa, mengevaluasi dan menetapkan Sertifikat Bulanan;
- b. Mengevaluasi dan mengeluarkan persetujuan terhadap usulan Penyedia Konstruksi tentang variasi kontrak yang tidak memiliki implikasi keuangan;
- c. Menentukan Titik Tunggu untuk memastikan bahwa tahap pekerjaan sebelumnya sesuai dengan ketentuan teknis dan dapat dilanjutkan dengan tahap pekerjaan berikutnya;
- d. Memberi persetujuan tertulis terhadap setiap tahap pekerjaan berdasarkan rencana dan metode pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menyusun, menyajikan, membahas, menyerahkan, melaksanakan, mengendalikan, merevisi, memutakhirkan Program Mutu untuk penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan, untuk memperoleh persetujuan PPK;
- f. Memeriksa dan menyetujui semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun sementara;
- g. Memeriksa, mengevaluasi dan menyediakan pernyataan tidak menolak pekerjaan sementara Penyedia Konstruksi yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- h. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Penyedia Konstruksi;
- i. Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;
- j. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak;
- k. Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi dibanding hasil akhir pekerjaan;
- l. Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan;
- m. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- n. Memeriksa dan memberi rekomendasi tentang penyusunan dan pemutakhiran QCP Penyedia Konstruksi;
- o. Memeriksa dan menguji kualitas material dan pekerjaan;
- p. Memeriksa dan mengukur kuantitas pekerjaan;
- q. Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;
- r. Menyusun laporan tentang hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat (laporan ketidakpatuhan);
- s. Memberi peringatan dan instruksi tertulis kepada pengawas pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- t. Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;
- u. Memeriksa dan membuat rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
- v. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- w. Menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan jika kontraktor tidak menangani masalah yang diberitahukan melalui surat peringatan, instruksi atau cara lain;
- x. Menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
- y. Melakukan, memeriksa dan menilai laporan Penyedia Konstruksi;
- z. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala.

Wewenang yang tetap dipegang PPK (tindakan yang harus disetujui PPK sebelum pelaksanaan) adalah sebagai berikut:

- a. Menambahkan dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menyebabkan perubahan nilai kontrak;
- b. Menambahkan jenis pekerjaan baru;
- c. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
- d. Mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e. Mensuskontrakkan bagian-bagian pekerjaan;
- f. Persetujuan perpanjangan masa kontrak setelah evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan Penyedia Konstruksi;
- g. Menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam kontrak sebagai bagian dari tenaga utama;
- h. Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.

Semua tindakan yang tidak tercantum di atas harus tunduk pada Adendum Kontrak.

16 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Masa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dari **Bulan Juli Tahun 2023** hingga **Desember Tahun 2023**, dengan total **180 Hari Kalender/6.00 bulan**.

17 Personel/Ketenagaan

Konsultan Pengawas harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sesuai ketentuan pada Tabel 1. Persyaratan Personel;

Selain Tim Inti, Konsultan harus menyediakan Personel Pendukung yang dibutuhkan (*office boy*) guna mendukung efektivitas layanan yang diberikan. Besaran remunerasi dan total biaya untuk masing-masing posisi harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/*Bill of Quantity*.

Tenaga Inti harus ditugaskan sesuai ketentuan orang-bulan yang dicantumkan pada Tabel 1 - Persyaratan Personel dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Direktorat Jenderal Bina Marga menggalakkan dan mendorong keberagaman dan inklusi dalam ketenagakerjaan. Konsultan Pengawas didorong untuk menyetarakan kesempatan kandidat perempuan pada posisi-posisi di atas.

18 Pelaporan Hasil Pekerjaan dan Jadwal Pelaporan

Hasil pekerjaan pengawasan yang wajib diserahkan kepada Pengguna Jasa harus sesuai dengan jadwal yang dicantumkan pada Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan. Waktu penyerahan laporan pekerjaan tambahan/khusus yang tidak direncanakan sebelumnya, dibuat sesuai persetujuan dengan Pengguna Jasa.

Apabila pekerjaan pengawasan menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu, dan persetujuan Laporan Hasil Pekerjaan oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform kolaborasi/CDE* Bina Marga sesuai dengan sistematika alur kerja atau (*workflow*) yang sudah disepakati.

Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan

Kegiatan/Hasil	Waktu/Milestone
Laporan Pendahuluan	1 bulan setelah penandatanganan Kontrak
Program Mutu	Saat Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan RKK	14 hari setelah mobilisasi
Laporan Bulanan	Mulai tanggal 5 bulan berjalan untuk periode bulan sebelumnya (periode yang mencakup tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sebelumnya), setelah penyerahan Laporan Pendahuluan (berulang tiap bulan)
Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi	Pertengahan Masa Kontrak asli/awal (didalam laporan bulanan pertengahan masa kontrak)
Laporan Akhir	15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak (atau sesuai perubahannya)
Laporan Ketidakpatuhan	Maksimum 2 hari setelah diketahui adanya ketidakpatuhan
Laporan Khusus/Lain	Ditentukan oleh/bersama PPK
Risalah Rapat Pembahasan Kemajuan	Maksimum 3 hari setelah setiap rapat

19 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan harus berisi:

- a. Pemahaman tentang jasa konsultan yang harus diberikan serta jangka waktu kontrak;
- b. Rencana kerja serta organisasi kerja;
- c. Penjadwalan dan pelaksanaan penugasan tenaga ahli; dan
- d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan (jika ada).

Laporan Pendahuluan harus diserahkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas.

20 Laporan Bulanan

Konsultan Pengawas harus mempersiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan secara berkala. Laporan kemajuan mencakup kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kemajuan layanan pengawasan/supervisi. Ketentuan Laporan Kemajuan disajikan pada bagian berikut.

20.1. Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi

Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan pelaksanaan konstruksi yang berisi informasi berikut:

- a. Ringkasan kemajuan pekerjaan fisik dibanding pekerjaan yang dilaksanakan bulan sebelumnya dan rencana pekerjaan minggu setelahnya;
- b. Foto-foto kemajuan pekerjaan;
- c. Ringkasan kemajuan keuangan serta sertifikat pembayaran;
- d. Variasi kontrak serta perubahan subpenyedia konstruksi (jika ada);
- e. Masalah dan kendala yang dihadapi serta langkah penanganan yang diambil;
- f. Status permintaan dan persetujuan yang diterima/diberikan;
- g. Status persetujuan terhadap dokumen wajib;
- h. Ringkasan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, verifikasi hasil pekerjaan serta persetujuan yang diberikan;
- i. Ringkasan kegiatan terkait pemantauan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial, termasuk ringkasan setiap kejadian kecelakaan atau risiko yang teridentifikasi; dan
- j. Kendala yang dialami Konsultan Pengawas, tindakan yang sudah atau akan diambil dan dukungan yang diperlukan dari Para Pihak lainnya.

Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan harus diserahkan setiap tanggal 5 tiap bulannya sebagai laporan untuk bulan sebelumnya yang mencakup kemajuan pekerjaan dari tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sebelumnya.

20.2. Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan dan Pelaksanaan Pengendalian Mutu

Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan yang berisi informasi berikut:

- a. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;

- b. Informasi personel;
- c. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Konsultan Pengawas;
- d. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Penyedia Konstruksi;
- e. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Pengguna Jasa;
- f. Masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah untuk mengatasinya dan dukungan yang diperlukan; dan
- g. Daftar laporan dan hasil pekerjaan yang sudah diserahkan dan Jadwalnya.

Laporan Kemajuan Bulanan Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya untuk periode sejak tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya hingga tanggal 25 bulan sebelumnya.

21 Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi

Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi oleh Konsultan Pengawas harus menyediakan informasi berikut:

- a. Hasil antara pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;
- b. Rincian kemajuan pelaksanaan pengawasan;
- c. Rencana kerja untuk jangka waktu tersisa;
- d. Jadwal personel dan sumber daya lain yang akan digunakan; dan
- e. Rekomendasi untuk Pengguna Jasa terkait hal-hal teknis dan manajerial (sesuai kebutuhan).

Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum akhir paruh pertama periode kontrak awal.

22 Laporan Akhir

22.1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Terkait dengan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Laporan Akhir berisi informasi gabungan yang tercantum dalam semua Laporan Bulanan sejak awal masa pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi. Selain itu, Laporan Akhir juga berisi evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi.

22.2. Laporan Akhir Konsultan Pengawas Pekerjaan

Konsultan Pengawas wajib menyediakan informasi-informasi berikut dalam Laporan Akhirnya:

- a. Rencana kerja awal untuk keseluruhan masa kontrak Konsultan Pengawas;
- b. Pemutakhiran rencana kerja awal yang dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan;
- c. Informasi umum tentang layanan yang disediakan;
- d. Sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengawasan (personel dan lainnya);
- e. Evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan layanan pengawasan dan rekomendasi untuk Pengguna Jasa.

NO. URUT	POSISI	BULAN KE-						KET
		I (3)	II (3)	III (5)	IV (6)	V (7)	VI (8)	
(1)	-2							(9)
II	BIAYA LAPORAN (FIXED RATE)							
	Preservasi Jalan Sihe ne'asi - Onozalukhu (Kab. Nias Utara)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali
	Preservasi Jalan Hilimbawade solo - Ombolata Idanoi (Kota Gunungsitoli)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali
	Preservasi Jalan Lahusa - Gomo (Kab.Nias Selatan)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali
	Preservasi Jalan Hiisebua - Daulo (Kab. Nias)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali
	Preservasi Jalan Wea Wea - Somi (Kab. Nias)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali
	Preservasi Jalan Laehuwa - Ombolata - Tumula - Faekhuna'a (Kab. Nias Utara)							
1	Laporan Program Mutu							1 Kali
2	Laporan RKK							1 Kali
3	Laporan Pendahuluan							1 Kali
4	Laporan Teknis							1 Kali
5	Laporan Bulanan							4 Kali
6	Laporan Akhir							1 Kali

23 Pengutamaan Tenaga Dalam Negeri

Semua sumber daya yang digunakan penyediaan jasa konsultansi sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan ini harus berasal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak akibat ketersediaan yang terbatas di dalam negeri.

24 Kerja Sama

Apabila diperlukan kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain untuk keberhasilan penyediaan jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan ini, maka persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a. Semua persyaratan yang mengacu pada Konsultan Pengawas akan berlaku sama bagi semua subkontraktor atau pihak lainnya yang terafiliasi;
- b. Konsultan Pengawas wajib menjalin kerja sama yang baik;
- c. Konsultan Pengawas akan meminta arahan PPK tentang persyaratan keterlibatan dengan penyedia layanan konsultasi lainnya.

25 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Gambaran informasi yang dikumpulkan;
- b. Petunjuk metodologi pengumpulan;
- c. Koordinat geografis lokasi pengumpulan data dalam format UTM;
- d. Waktu dan tanggal pengumpulan data;
- e. Rincian kontak dari pihak saksi lainnya (jika ada).

26. Alih Pengetahuan

Jika dipandang perlu oleh PPK yang menangani kontrak ini, konsultan perencana wajib melaksanakan pelatihan, kursus singkat, diskusi, dan seminar terkait substansi pelaksanaan kegiatan pekerjaan dan rencana/desain yang diajukan untuk kepentingan alih pengetahuan kepada staf yang ditentukan oleh PPK.

Medan, 15 Mei 2023
PPK Pengawasan

Satker Perencanaan dan Pengawasan
Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara,



Mainila Yanti, ST, MT
NIP. 19790514 200502 2 002